



BOOK MEMORANDUM
DISI
I. D

II. E

III. L



PUSAT PEMBERITAAN (INFORMATION CENTRE) ANGKATAN BERSENJATA

INFO UNTUK PARA PENDIJABAT/PETUGAS;/PERTAHANAN/KEAMANAN, KARYAWAN
ANGKATAN BERSENJATA DAN MASJARAKAT UMUM JANG BERKEPENTINGAN.

DIREKTORAT UMUM/HANKAM

Diterbitkan oleh Jajasan "AKRAB"

Alamat Redaksi: Djl. Kathedral 2&4 Djakarta

SK MENPEN No. 0524/PEN/SK/DIRDJEN/PPG/1966

Telpon Redaksi/Tata Usaha: 47858 Pst. 6-8-97

DJAKARTA, 15 DESEMBER, 1967.

NO:722/TH.III/67.

DISI PAGI

INTISARI BERITA

I. U M U M :

1 - 1	Ketua MPRS Djenderal Nasution : PERS MEMPUNJAI PERTANGGUNGAN DJAWAB BAGI PEM-..hal 1 BINAAN RAKJAT INDONESIAhal 1	1
1 - 2	SEORANG LEVERANSIR BERAS SELEWENGKAN 500 TON...hal 4 BERAShal 4	4
1 - 3	MENLU ADAM MALIK TENTANG PENTINGNJA GOLONGAN...hal 6 INDEPENDENThal 6	6
1 - 4	"SI TOPI TURKI" PUNJA DJARING2 DENGAN BEBERA-..hal 7 PA PENGGEDE DJABARhal 7	7
1 - 5	ORANG2 JANG TIDAK PUASA KLABAKAN TJARI WA-.....hal 13 RUNG NASIhal 13	13
1 - 6	PD PRESIDEN TERIMA SURAT2 KEPERTJAJAAN DARI....hal 13 DUBES2 NORWEGIA DAN MALAYSIAhal 13	13
1 - 7	MASALAH DJUDI MENDJADI PEMBITJARAAN HANGAThal 17 GUBERNUR - WARTAWANhal 17	17

II. E K U I N :

2 - 1	Pernyataan P.P.Kapni & IKUT SERTAKAN HATTA, SJAFRUDIN, SUMITROhal 1 DAN KASIMOhal 1	1
2 - 2	MENTERI PERDAGANGAN TERIMA KUNDJUNGANhal 18 GUBERNUR SULUThal 18	18

III. L U A R N E G E R I :

3 - 1	RADJA KONSTATINE DIPETJAT OLEH KOL.PAPADUPULIS.hal 1	1
3 - 2	KORBAN GEMPA BUMI DI INDIA MENINGKAThal 4 MENDJADI 172 ORANGhal 4	4

Dan lain-lain.

-----oSo-----

Ketua MPRS Djendral Nasution:

PERS MEMPUNJAI PERTANGGUNGAN DJAWAB BAGI PEMBINA-
AN RAKJAT INDONESIA

⊕ Pers djuga dapat didjadikan
alat penggerak massa.

Djakarta, 15 Des.(PAB)

Ketua MPRS Djend.A.H.Nasution menandakan bahwa, pers mempunjai pertanggungan djawab bagi pembinaan rakjat Indonesia sehingga mendjadi warga negara jang benar2 sang gup utk mengamankan dan mengamalkan PANTJASILA. Hal ini disebabkan oleh peranan pers jang dapat kiranja diikuti pada perumusan MPRS dalam Sidang Umum ke IV jl, jg al. mengatakan bahwa pers disamping sebagai alat social control, adalhdjuga sebagai alat pendidik, alat penja- lur, dan pembentuk pendapat umum serta alat penggerak massa.

Pernyataan Pak Nas ini disampaikan dalam menjam but hari Ultah tantor berita "Antara" jg ke XXX th jg di batjakan oleh kerwira Staf Pribadi Ketua MPRS Letkol CKH Supolo Bc Hk, Rabu malam jl.

Dalam sambutanja itu, Djendral. Nasution mengemukakan bahwa, karena peranan pers jg demikian itulah, maka kete tapan MPRS no.XXXIII/66 telah memutuskan bahwa kebebasan pers berhubungan erat dengan keharusan adanja pertanggungan djawab kepada KETUHANAN jang MAHA ESA, Kepentingan Rak jat dan Keselamatan Negara, Moral dan Tata su sila, kepri badian bangsa serta terwujudnja tjita2 Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dan oleh karenaitu, pula, demikian Pak Nas, maka kebebasan pers Indonesia adalah kebebasahutk menjatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan dan bukan kebeba san dlm pengertian liberalisme.

Jang harus dihadapi pers pada
dewasa ini.

Sementara itu Ketua MPRS Djendral Nasution menan daskan bahwa mengingat akan peranan pers dalam ikut membi na dan membela kepentingan rakjat dan keselamatan negara serta terwujudnja tjita2 proklamasi 17 Agustus 1945, maka Djendral Nasution mengemukakan beberapa pokok jang harus dihadapi oleh pers dewasa ini.

Tahap pertama dari perdjjoangan Orba jang berupa penjingkiranringan2 politik danphysik jg dipisang oleh Orla elah kita lakukan melalui operasi2 anti G30S anti durno, anti penjelewengan thd UUD'45 dan anti dua lime dlm kepemimpinan negara, Operasi2 itu setjara stra tegi telah berhasil, dan oleh karena itu kita sekarang telah meningkat kepada tahap kedua.

Tahap.....

THE HISTORY OF THE
REPUBLIC OF THE UNITED STATES

...the first of the ...
...the second of the ...
...the third of the ...
...the fourth of the ...
...the fifth of the ...
...the sixth of the ...
...the seventh of the ...
...the eighth of the ...
...the ninth of the ...
...the tenth of the ...
...the eleventh of the ...
...the twelfth of the ...
...the thirteenth of the ...
...the fourteenth of the ...
...the fifteenth of the ...
...the sixteenth of the ...
...the seventeenth of the ...
...the eighteenth of the ...
...the nineteenth of the ...
...the twentieth of the ...
...the twenty-first of the ...
...the twenty-second of the ...
...the twenty-third of the ...
...the twenty-fourth of the ...
...the twenty-fifth of the ...
...the twenty-sixth of the ...
...the twenty-seventh of the ...
...the twenty-eighth of the ...
...the twenty-ninth of the ...
...the thirtieth of the ...



Tahap kedua yang saja maksudkan itu ialah penegakan dan pengisian Orba yang berupa follow up tahap pertama dalam rangka memperbaharui kehidupan politik khususnya serta kehidupan mental, ekonomi, sosial budaya dan nilai terpadu umumnya. Ada 6 hal yang perlu digarap dalam hal ini, yaitu :

- (1) Meningkatkan kekompakan Orba dalam suatu wadah partnership sebagaimana diandjurkan oleh sidang ke II Badan Kerdja MPRS bulan Agustus 1966. Wadah partnership ini adalah penting dan mutlak perlu, sebab adanya wadah tsb isatu pihak dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan2 yg dapat mengganggu kekompakan sesama Orba seperti yang terdjadi akhir2 ini dan dilain pihak dapat setjara positif digunakan utk bersama2 menjusun strategie perdjangan.
- (2) Meningkatkan kekompakan /integrasi ABRI sendiri berhubung dengan peranannya yg penting sebagai stabilisator tahap sekarang danagar tidak lagi bisa diadu domba seperti yang telah berkali-kali diusahakan oleh pihak Orba dimasa yang lalu. Keputusan Presiden No.132/67 adalah tindakan positif kearah tertjapainya maksud tsb. Demikian pula rantjangan ketetapan MPRS tentang penegasan landasan2 Pokok Keamanan Nasional yang baru2 ini disusun oleh BP MPRS akan memberikan pedoman2 kepada kita menudju tertjapainya tjita2 itu.
- (3) Meningkatkan fungsi Lembaga2 Demokrasibaik di Pusat maupun didaerah sehingga Lembaga2 ini benar2 merupakan penjalur suara hati nurani rakyat dan pengontrol terhadap pemerintah, sesuai pedoman2 yang digariskan oleh UUD'45.
- (4) Meningkatkan daya guna aparatur pemerintahan sebagai pelaksana2 Kabinet Ampera. Ini berarti disatu pihak setjara positif meningkatkan daya upaya mental dan tehnik yang menjakup organisasi, personalia dan tata kerdja, sedang dilain pihak harus diadakan setjara sistimatis pemberantasan salah urus, korupsi, birokrasi, penjelewengan dan lain2 hal yg bersifat negatif, tanpa pandang bulu.
- (5) Melaksanakan follow up dari pembubarahan PKI yang berupa pembersihan aparatur pertahanan keamanan dari unsur2 yg terlibat atau berindikasi sesuai Instruksi Hankam No. 1015 /65, pembersihan aparatur pemerintahan sesuai Instruksi KOTI No.22 dan KOGAM No.009 serta pembersihan parpol/ormas dari oknum2 G 30 S/PKI es dan melarang menampungnya dalam parpol2 /ormas2 yg ada.
- (6) Pemeriksaan pertanggungjaban dan pengembalian ke pada uang dan barang2 dalam rangka Dana revolusi, kredit khusus dsb yang djumlahnya tidak ketjil baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentukdevisa.

Enam hal sebagaimana saja sebut tadi demikian Pak Nas perlu saja kedepankan lagi, karena akhir2 ini kita teralalu di "sibuk2kan" oleh hal2 yang bersifat "taktis" sehingga lupa akan hal2 yang mempunjai nilai "strategis".

Menurut.....



(c)

Menurut Pak Nas ke 6 hal pokok itu harus digarap sekaligus, apabila kita ingin tertjapainja stabilisasi politik dan ekonomi jang berarti tertjapainja program pokok Kabinet "mpera, sebagai prasarakat untuk dapat dimulai pembangunan jang sesungguhnya.

Selain keenam hal pokok itu jang djustru lebih penting dan lebih urgen bagi tegaknja orba adalah pembaharuan kehidupan politik setjara mendasar dan menjeluruh, sebab sebagaimana telah ber-kali2saja katakan, Orba bukanlah sekedar Orla minus PKI dan PBR.

Disamping pembaharuan kehidupan politik setjara mendasar dan menjeluruh, maka perlu dibina pengrasio nilai tjara berfikir dan bekerdja disegala bidang dan tingkat.

Inilah hal2 pokok jg perlu kita garap pada tahap ke II perdjoangan Orba, setelah bintang2 jang dipasang oleh Orla setjara "stratègis" dapat kita singkikan.

Demikian Pak Nas.

(R09/rel/PAB/XII/67).

----(w)----

SEKITAR PENJALONAN ANGGOTA2 BARU MAHKAMAH AGUNG

Djakarta, 15 Desember (PAB).-

Pd.Presiden Djendral Soeharto bersama2 dengan Ketua Mahkamah Agung Surjadi SH dan Menteri Kehakiman Senoadji SH, di Istana Merdeka telah membicarakan masalah rentjana penambahan keanggotaan Mahkamah Agung.

Diperoleh keterangan, bahwa sampai dengan saat itu waktu lagi sambil menunggu surat pengadju an resmi dari DPRGR mengenai tjalon2 jang diadjukan.

Seperti diketahu baru2 ini DPRGR telah mengadakan 11 orang tjalon, sedangkan rentjana penambahan keanggotaan Mahkamah Agung hanya 5 orang anggota tambahan. /Pd.Presiden belum bisa mengadakan keputusan. Dalam hal ini masih diperlukan

(R012/VS/PAB/XII/67)

---- S1 ----



U M U M :

15 - 12 - 1967

SEORANG LEVERANSIR BERAS SELEWENGGAN
500 TON BERAS

+ Jang melaporan mlah
ditahan samai sekarang.

Tjirebon, 15 Desember (PAB).

Karena melaporan penjelewengan beras BPUP se banjak 500 ton jang terdjadi di Tjerebon, maka seorang pelapor bernama T sampai sekarang masih meringkuk dalam tahanan. Denikian "pikiran Rakjat" Bandung jang selan djutnja mendjelaskan bahwa T mula2 lapor kepada AKRI bahwa seorang Leverancier beras telah menjelewengkan 500 ton beras seharga Rp.15 djuta dengan djalan menggunakan for mulir model P-2 jang ternjata kosong.

Begitu menerima laporan dari T jang kebetulan pegawai BPUP, segera pihak AKRI melakukan pengusutan terhadap tersangka leverancier jang telah menjeleweng itu. Tapi tatkala pengusutan berlangsung ditangan AKRI tiba2 dikedjutkan, karena ada instansi lain menang kap pelapor T jang katanja terlibat/berindikasi Gestapu/PKI. Sedangkan sipenjeleweng beras jaitu leverancier tadi tiba2 pula "diambil alih" alias dilindungi oleh oknum2 dari Instansi jg telah mengamankan T.

Dalam hubungan ini para pedjabat setempat di Tjirebon menjatakan rasa heran karena T ditangkap oleh oknum instansi lain tatkala ia melakukan pembongkaran penjelewengan beras BPUP Tjirebon.

(R025/S/PAB/XII/67).

----(w)----

MAJAT TERGANTUNG DALAM GERBONG KERETA API...

Bandung, 15 Des.(PAB)

Publik jg berada di kompleks stasiun Bandung di kedjutkan oleh diketemukannya sesosok tubuh manusia jang telah mendjadi majat tergantung didalam sebuah gerbong kereta api.

Peristiwa itu terdjadi hari Selasa jl dispoor K.A.dalam gerbong kelas II No. BC 307, dimana rel tsb djarang dilalui oleh KA.

Dari kartu penduduknja diketahui bahwa majat itu bernama Udin bin Elnasan berasal kampung Tjidang dung desa pangrauban ketjakatan Tjisurupan (distrikBajong Bung, Kabupaten Garut.)

Udin diduga mengantungkandiri dengan nem pergunakan seutas tali, dan didekatnja ditemukan barang2 berupa satu bungkus kain biru jg berisi pipa rokok hitam dan 2 gulung benang hitam dan putih.

Sebab2 perbuatan itu masih dalam penjelidi kan pihak Polisi sedangkan majat korban t lahdiangkut ke rumah sakit umum Pusat "HSan Sadikin" Bandung.

(R025/S/PAB/XII/67).

----(w)----



15-12-1967.-

U M U M :

LIMEX PAKAI PRAMUGARI

Surabaya, 15 Desember (PAB).-

Dari pihak yang dapat dipertjaja diperoleh keterangan bahwa Limex kini madju selangkah, yaitu dengan menaikkan mutu "public service" penumpang, dengan djalan mengerahkan tenaga2 Pramugari.

Mungkin waktu berita ini dibatja, para pramugari Limex tsb. sudah mulai bertugas, mendampingi rekan2 Pramugara.

(R020/P/PAB/XII/67).-

----- S1 -----

KAMI SURABAJA TUNTUT PEMBEBUKAN PNI / FM.

Surabaya, 15 Desember (PAB).-

Dalam surat dinasja, KAMI Surabaya mengulasulkan agar PNI/FM segera dibekukan, karena waktu yang diberikan untuk konsolidasi, tidak dipergunakan. Hal tsb dikemukakanja pada senat dinas KAMI yang ditudjukan kepada Pangdam VIII Brawidjaja, Majdjen M. Jasin.

Sementara itu KAMI Surabaya giat melakukan self control, bahkan baru2 ini telah men-schor beberapa anggotanja.

Surat kepada Pangdam tsb ditanda tangani oleh Pd.Ket.Periodik Drs. Med. Moelia Radja Siregar dan Sekretarisnja, Drs. Med. A.J. Ely.

(R020/P/PAB/XII/67).-

----- S1 -----

ORGANISASI DHARMA PERTIWI WILAJAH KAL.DIBENTUK

Bandjarmasin, 15 Desember (PAB).-

Pimpinan2 Persit KCK, PIA, Jalesenastri, Bhangkari tingkat wilajah Kalimantan dalam rangka pembentukan Dharma Pertiwi didaerah Kalimantan telah mengadakan Rapat di kediaman Panganda Kal pada hari Sabtu tgl. 9 Desember jl. Dalam rapat tsb pihak Persit KCK diwakili oleh ibu D. Soemartono, Ibu Ramli Sumardhi dari PIA, Ibu Nunung Subandi dari Jalesenastri, ibu Soekahar dari (Bbajangkary.)

Telah.....

THE ...

The ... of ...
The ... of ...
The ... of ...

THE ...

The ... of ...
The ... of ...

The ... of ...
The ... of ...

The ... of ...
The ... of ...

The ... of ...
The ... of ...

THE ...

The ... of ...
The ... of ...

The ... of ...
The ... of ...

The ... of ...
The ... of ...



U M U M :

15-12-1967

Telah diputuskan hasilnja dengan susunan pengurus Dharma Pertiwi wilajab Kal tsb sbb.: Ketua Umum Ibu D. Soemartono, Ketua I. Ibu Ramli Soemardhi (PIA) Ketua II Ibu Nunung Subandi (Jalesnastri), Ketua III Ibu Soekahar (Bhajangkari).

Sedang tudjuan Organisasi Dharma Pertiwi jaitu mengifisienkan usaha2 dan pekerdjaan2 yang bersamaan sifatnja guna mentjapai hasil yang lebih besar dan berarti dalam memperdjoangkan dan menjabdi untuk Kepentingan Nasional. Selain itu djuga untuk menafamkan, memupuk serta membina rasa senasib seperdjuangan dan persatuan yang erat dikalangan wanita Indonesia pada umumnya dan keluarga Angkatan Bersendjata khususnja.

Demikian Ketua Umum Dharma Pertiwi Wilajab Kalimantan dalam keterangannya kepada Ka Penanda Kalimantan.

(R09/Re1/PAB/XII/67).

----- S1 -----

MENLU ADAM MALIK TENTANG PENTINGNJA GOLONGAN INDEPENDENT.

Djakarta, 15 Desember (PAB).--

Menlu Adam Malik di Istana Merdeka Kamis siang mengatakan perlunya segera dibentuk suatu wadah bagi golongan2 independent yang sangat berguna untuk mengisi vacuum yang ada dalam masyarakat kita dewasa ini.

Menlu Adam Malik mengatakan, bahwa keanggotaan independent group dapat dimasuki oleh siapa saja yang merasa dirangsang Orde baru, baik ia anggota parpol, ormas maupun ABRI. Dalam hal ini Adam Malik menyatakan, bahwa segera setelah terbentuknja independent group itu maka ia akan menjadi salah satu anggotanja.

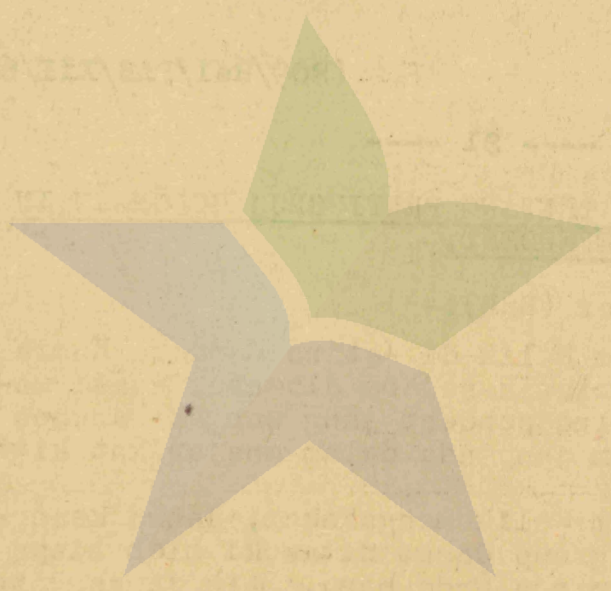
Sementara itu Menlu mengatakan bahwa perundingan2 bilateral dalam rangka Amsterdam Meeting masih tetap akan dilangsungkan. Djuga dengan negara2 sosialis perundingan2 bilateral akan dilangsungkan. yang menurut Adam Malik direntjanakan diadakan minggu depan. Dalam padaitu Adam Malik mengakui adanya kesulitan2 yang dihadapi dengan negara2 sosialis dalam pembitjaraan mengenai hutang Indonesia kepada negara2 tsb.

(R012/VS/PAB/XII/67).--

----- S1 -----

1871
1872

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

U M U M :

15 -12 -'67

"SI TOPI" TURKI" PUNJA DJARING2 DENGAN
BEBERAPA PENGGEDE DJABAR

⊕ Oknum Pimpinan DPRD pun kena
rangkul.

Bandung, 15 Des. (PAB)

Persoalan manipulasi beras yang dilakukan oleh pengusaha Angkutan HBA alias "Si Topi Turki" dan kini dalam pengusutan pihak berwajib, ternyata mempunyai djaring2 yang luas dan menjangkut beberapa penggede di djawa barat.

Pihak berwajib, jg sedang giat melakukan penje lidikan atas diri HBA, merasa terkedjut sekali tatkala menemukan petundjuk2 jg mendjurus kepada beberapa tokoh terkenal di Djabar. Seperti pernah dibertakan, HBA disi njalir menggelapkan beras puluhan ton, manipulasi dalam kualitas dan kwantitas beras pemerintah yang diangkut dari Karawang ke Bandung, mengintimidasikan para petugas BPUP diantaranya pernah menodongkan pistol kepada salah seorang petugas BPUP. Sementara HBA ini masih mempunyai perkara tunggakan perkara korupsi tahun 1963 sebesar puluhan djuta rupiah, yang proses pemeriksaannya di penga dilan negeri Bandung "latjet" dikarenakan tjampur tangan nya oknum eksekutif di zaman Orla.

Tapi saking lihaynja Si Topi Turki dalam tjari "hopeng", maka oknum pedjabat yang duduk dalam pimpinan legislatif Djabar pun dapat dirangk... ia, sehingga tanpa sa dar terperosok kerdjasama dalam usaha "dagang" dengan HBA. (R025 3/PAB/XII/67).

----- (w) -----

KENAPA TJINA PENIPU UANG RP.25 DJUTA BEBAS?

Bandung, 15 Des. (PAB)

Sedjumlah orang yang pernah melaporkan kena tipu hingga menderita rugi puluhan djuta rupiah, mereka heran2 se telah melihat tersangka nya bebas bergerak sebelum vonnis Pengadilan djatuh.

L.S.S. (40 th) seorang djanda wanita keturunan tjina, demikian nama tersangka itu, beberapa bulan jl pernah disekap oleh pihak AKRI Djabar di Bandung atas tuduhan melakukan penipuan.

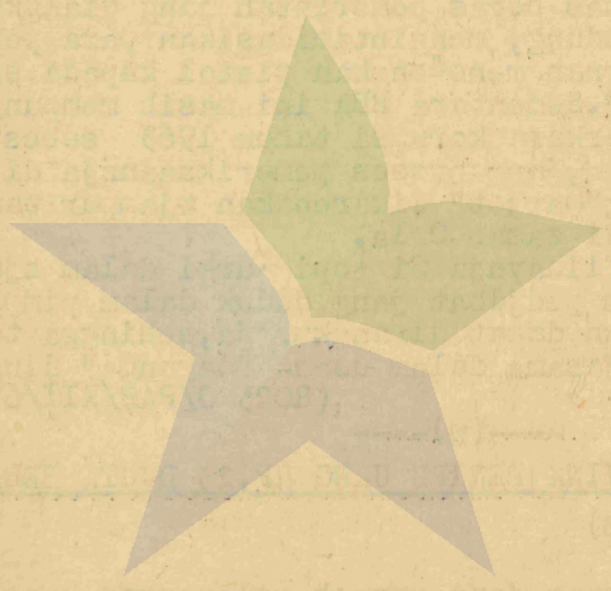
Dalam pemeriksaan didepan Polisi dulu, tersangka LSS mentjoba mungkir atas tuduhan penipuan, dengan mendjelaskan, bahwa tersangka pernah menerima uang titipan dan terus diputarkannya serta kemudian bunganya diberikan kepada setiap pemilik uang. Djumlah uang yang diterimanja saat itu sekitar Rp.25. d juta.

Perkara penipu LSS itu diserahkan oleh AKRI ke Kedjaksanaan Negeri Bandung dan dari instansi inilah tersangka LSS mulai ditahan diluar.

(R025/S/PAB/XII/67).

----- (w) -----

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



U M U M :

15 - 12 - 1967.-

PERSIT KCKC TJAB. KOANDA KAL Nj.M.
KIRIM BINGKISAN KEPADA PRADJURIT 2
DIPERBATASAN KALBAR.

Bandjarmasin, 15 Des '67 (PAB).-

Dalam rangka menjongsong Hari NATAL dan TAHUN BARU serta IDUL FITRI, PERSIT KCK TJAB KOANDA KAL akan mengirinkan bingkisan untuk para Pradjurit jang sedang mendjalankan tugasnja di Medan Operasi Kalimantan Barat. Pelaksanaan pengiriman bingkisan ini jaitu melalui bantuan KOWILU II KALIMANTAN. Demikian ketua PERSIT KCK TJAB. KOANDA KAL Nj.M, SAID kepada KA-PEMANDA KALIMANTAN.

Selandjutnja oleh Nj, M. SAID ditambahkan bahwa PERSIT KCK TJAB KOANDA KAL dalam rangka membantu kese djateraan keluarga Pradjurit jang ditinggalkan suaminja bertugas ke KALBAR, berusaha menjediakan bahan 2 Sandang - Pangan jang harganja lebih murah dari pada harga pasar.

(R.09/Rel/PAB/XII/67).-

.....vs.....

DJAKARTA SEBAGAI KOTA REKREASI .

Dkt, 15 Des '67 (PAB).-

Beberapa malan ini ibu kota tampaknja meriah dengan adanya aneka warna lampu 2 jang menjala diwaktu malan hari. Lampu ini hanja pada djalanan jang tertentu sadja dipasang misalnja djalan Thamrin, djalan Diponegoro dan djalan jang kira akan ramai dikundjungi oleh masjarekat. Usaha ini dimaksud oleh Gubernur KODI Djawa sebagai Pertjobaan untuk mendjediakan sebagai kota rekreasi. Djakarta akan mendjadi kota Rekreasi pada saat tertentu hingga dapat menarik banjak pengundjung dari seluruh Indonesia.

Djika Usahaini berhasil maka fungsi kota Djakarta sebagai kota Niaga dan kota industri akan bertumbuh pula mendjadi kota rekreasi pada taraf Nasional jang berarti akan memberi hasil tambahan bagi warga Ibukota, dan pelaksanaan ini sengadja dilaksanakan pada saat kita sedang menghadapi hari2 Raya Natal, Tahun Baru dan Idul Fitri.

(R.O 5/S/PAB/XII/67).-

.....vs.....



10 ULAMA TERKENUKA KOTA BANDUNG BERDISKUSI

Bandung, 15 Des. (PAB)

10 orang ulama terkenal dikota Bandung setiap malam sehabis tarawih setjara bergilir memberikan tjeramah² dan mengadakan diskusi. Tjeramah dan diskusi itu berlangsung atas undangan panitia kem kmuran mesdjid Unpad dibawah T. Siregar dan Hariudan masing² selaku ketua dan Sekretaris panitia tsb.

Perlu diketahui, bahwa tjeramah dan diskusi jang terbuka untuk umum itu telah menarik perhatian masjarakat sehingga tiap malam selalu penuh. Dapat ditambahkan, bhw ke 10 ulama itu alah Letkol A. Solaiman (Rochdam VI/Siliwangi) Major A. Zainuddin (Rochdam VI/Siliwangi) Mughtar Adam Kapten Anwar Wahid, Rusjad Nurdin, A. Latif, Drs. K. Sukar ma. Drs. Sjaiful Hadi, E.Z. Muttaqien dan H. Bustami Darwis,

(R 025/S/PAB/XII/67).

-----(w)----

PENGUNDJUNG KEBUN BINATANG BANDUNG BERTAMBAH BANJAK SELAMA BULAN PUASA.

Bandung, 15 Des. (PAB)

Dlm bulan puasa ini para pengundjung kebun binatang bandung makin bertambah banjak hingga tertjatat pada minggu jbl sampai 9.156 orang dan pada minggu kedua sampai 12.064.

Demikian keterangan Somawinata pendjaga kartjis di kebun binatang tsb jang sodjak mulai dibukanja dulu hingga kini sudah berusia 70 tahun. Kakek Somawinata selandjutnja menerangkan, bahwa kebun binatang Bandung itu didirikan oleh orang² Belanda jaitu Dr. Jacobson Mr. Hoogeland dan Prof. Van Der Veel pada th 1932.

Atas pertanyaan, Somawinata mengemukakan bahwa kebun binatang bandung jang terletak diatas tanah selama 18½ hektar adalah milik Jajasan Margasatwa Bandung, jang sekarang dipimpin oleh Rd. Djuarsa, pensiunan Bupati Tjiandjur,

Kakek Somawinata keadaan kebun Binatang ini jg merupakan tempat rekreasi rakjat termurah keadaannja sangat menjedihkan karena tidak teratur tidak terpelihara.

Mengenai "penghuni" kebun binatang Bandung jg masih ada terdapat 2 singa, 2 matjam tutul, 1 matjam Lodaja 1 gajah 1 beruang merah, 1 beruang hitam, 2 orang utan dan matjam² burung.

(R025/S/PAB/XII/67).

-----(w)----



U M U M :

15 - 12 - 1967 .-

Ka Pendak VII Langlanggusa Djabar:

TIDAK BENAR ADA KLIK2AN DALAM TUBUH AKRI

Bandung 15 Des, (PAB).-

Ka Pendak VIII/ LLB Djawa Barat AKBP E.G Lury mengakui bahwa memang ada tersiar desas-desus seolah2 ada saling mendongkel antara sesama Perwira AKRI, namun demikian E.G Lury membantah kebenaran desas-desus itu.

Menurut AKBP Lury, katanya beritahu ts se-akan2 bersumber dari ke Pusen AK dan Pendak VIII/LLB Djabar.

Hal ts tidak benarsana sekali, baik Pendak VIII/LLB maupun Puspen A.K. tidak pernah mengeluarkan pernyataan demikian, berkata Lury.

Tengenai pengamanan ke 4 Perwira AKRI masing2 dari MABAK dan dari KONDAK VIII/LLB Djabar tidak punja motif klik an seperti yang didesas desuskan oleh sementara masyarakat. Mereka diaman kan atas tuduhan indikasi G-30-S/P.K.I. dan B.P.I. dalam rangka pembersihan tubuh AKRI dari sisa 2 G-30-S dan sisa2 oknum2 yang ingin mengem-balikan Olla.

Tentang AKP J.S., yang diberita kan oleh sementara Pers ada hubungannya dengan pe-ngebonan nara pidana, Ka. Pendak VIII men-djelaskan, bahwa ia belum menerima laporan dari Kondak VIII Djabar.

Untuk memberi pendjelasan kepada masyarakat akan diusahakan mendapatkan bahan2 yang lengkap demikian AKBP E.G Lury.

(R.025/S/PAB/XII/67).-

.....VS.....

MAJOR SUPOLO BE HK PAIK PANGKAT.

Dkt, 15 Des, '67 (PAB).-

Kepala Humas/Staf Pribadi Ketua MPRS Major Supolo Be HK, rupanja pangkatnja telah dinaikan mendjadi Letnan Kolonel. Hal ini diketahui oleh wartawan PAB ketika berdjumpa dengan beliau diruang kerdjanya, dipundak Pak Supolo, yang biasanja nongkrong bintang kuning atas dasar hitan hanya satu, kini ter-njata sudah dua bintang.

Menurut keterangan Letkol CHK Supolo Be HK, bahwa kenaikan Pangkatnja itu sudah berlaku sedjak tanggal 1 Djanuari 1967 yang lalu.

Untuk kenaikan pangkatnjadini, segenap Redaksi PAB mengu-tjapkan "Selamat".-

(R.03/A03/PAB/XII/67).-

.....VS.....



15-12-1967.

U M U M :

KORAN2 DI DJATIM MATJET 3 HARI

Surabaja, 15 Desember (PAB).-

Boleh dikatakan semua koran2 di Djatim, mulai Djumat 8 Des.67 s./d Senin 11 Desember 67, telah matjet, tidak dapat terbit karena kehabisan kertas koran. Beberapa surat kabar telah bekerdja sama dengan majalah yang terbit sebulan sekali atau mingguan, sebab persediaan kertas masih tjukup untuk beberapa hari. Ini adalah djalan satu2nja untuk mengatasi kematjetan lebih landjut.

Beberapa koran mengatakan bahwa djatah-nja bulan Oktober 67 baru diterima separo, sedang djatah kertas Nopember 67 belum diterima, apalagi djatah Desember 67.

Sampai sebegitu djauh, PAB belum mengetahui, sebab musabab keterlambatan djatah tersebut.

(R020/P/PAB/XII/67).-

----- S1 -----

SJARAT UTAMA HARUSLAH SEORANG "WANITA"....

Surabaja, 15 Desember (PAB).-

Pusdik Kowal tahun adjaran 68 telah membuka penerimaan tjalon2 ^{ke III dengan sjarat2} "10" angkatan al.sbb.:

1. WNI Wanita. 2. Idjazah SLA atau sederadjat, berda sarkan sehat, umur min.18 th.max 25 tahun tidak berkatjamata--belum pernah kawin dll.

Lamaran ditudjukan kepada Komando Penerimaan Tenaga AL (Kopetal), djalan Jos Soedarso 3 Malang. Keterangan lebih landjut, dapat menghubungi instansi2 ALRI terdekat atau kepada Rendamar 5, djalan Diponegoro 15 Surabaja.

(R020/P/PAB/XII/67).-

----- S1 -----



U M U M :

15-12-1967

LPS SUMBANG Rp.83.153,80 KEPADA DEP.SOSIAL

+ Uang tsb disumbangkan kembali oleh Depsos pd.LPS.

Djakarta, 15 Desember (FAB).-

Kamis pagi, diruang kerjaria, Menteri Sosial, Dr. A.M.Tambunan S.H. telah menerima sumbangan sebesar Rp.83.153,80 dari Ds.K.H. Sinaga, sebagai Ketua II Lembaga Pembinaan Sosial.

Perlu didjelaskan, bahwa sumbangan tsb, adalah hasil jg.didapat dari pertundjukan "Deutsche Tanzer" yang baru2 diadakan pada tel.27 dan 29 Nopember jl di Bali Room Hotel Indonesia, yang disponsori oleh Goethe Institute.

Menteri Sosial menjerahkan sumbangan tersebut kepada Lembaga Pembinaan Sosial, sebagai work-Kapital, agar tugas LPS dapat dilaksanakan dan ditingkatkan serbaik2nja.

Kerdja samajang lebih baik diharapkan antar Depsos dengan LPS dihari2 mendatang.

Kol.Inf. Achmadi selaku dirdjen Bina Karya dan merangkap sebagai Ketua I Lembaga Pembinaan Sosial menyatakan, bahwa sebagian dari sumbangan tersebut akan diserahkan kepada Jajasan Pemeliharaan Anak Tjatjat Djakarta, sesuai dengan keinginan dari Pimpinan Goethe Institute, Mr. Backer.

+300 pantiul dari RDD.-

Perlu ditambahkan, bahwa Lembaga Pembinaan Sosial baru2 ini telah menerima 300 buah tjankul dari Konsul Djerman Timur dan dikemudian hari ditandung maksud untuk menginstensifkan kerdja sama dengan negara2 asing lainnja.

Untuk menjiptakan suasana yang baik mendjelang Hari2 besar ini, LPS dalam program kerjanya telah membentuk team2 yang terdiri dari 3 rombongan Adang yang di bulan Djanuari akan mengundjungi badan2 sosial untuk menjampaikan bingkisan2. Sumbangan dari Advent telah diterima sebanyak 1000 potong pakaian.

Dalam bulan Djanuari ini djuga diwantipakan untuk mengadakan pertemuan dengan semua pimpinan Lanti asuban diseluruh Djakarta dengan maksud meningkatkan kerdja sama dan memperkenalkan usaha2 LPS.

Perlu diketahuai usaha2 LPS ini a.l.:
menanggulangi masalah tuna karya, menjeleng arakan usaha2 amal dan mengadakan kontak2 dengan badan2 luar Negeri.

Pada.....



5-12-1967.-

U M U M :

Pada kesempatan ini Menteri Sosial diwakili oleh dirdjen Bina Karya, Kol.I. Achmad, Direktur Direktorat Tuna Karya, Achmad dan dari Pihak LPS diwakili oleh Ds.K.M. Sinaga, Ds.H. Sinaga dan Soewito Resoatmodjo.

(RO49/ SI PAB/III/67)..-

----- SI -----

ORANG2 JANG TIDAK PUASA KEBERAKAN TJARI
WARUNG NASI.....

Djakarta, 15 Desember (PAB).-

Sedjak mengindjak bulan Puasa tabun ini, Restoran/Warung2 Padang jang biasanja memberikan pe lajanan setjara siang malam kepada masjarakat Ibukota, telah tutup disiang hari.

Dengan tidak dibukanja sebagian besar warung2 itu masjarakat jang tidak puasa kelabakan. Sementara itu warung2 Tjinajang kebanjakan berdjua lan Bakmi, dan minuman2 telah mendjadi tempat pelarian orang2 jang tidak berpuasa. Demikian laporan wartawan PAB.

(RO55/ SI PAB/III/67)..-

----- SI -----

PD PRESIDEN TERIMA SURAT2KEPERTJAJAAN DARI DUBES 2
NORWEGIA DAN MALAYSIA

Djakarta, 15 Desember (PAB).-

Pd. presiden Djendral Soeharto Kamis pagi berturut2 telah menerima surat2 kepertjajaan dari Duta2 Besar Norwegia dan Malaysia untuk Indonesia bertempat di Istana Merdeka.

Dalam kedua upatjara penjerahan surat2 kepertjajaan tsb tidak diadakan toast, berhubung bulan puasa. Sementaraitu khusus dalam upatjara penjerahan surat2 kepertjajaan Dubes Malaysia Tan Sri S'coub suasana berdjalan dengan penuh persaudaraan dimana tampak djelas terlibat adanja kesamaan pendapat, kesungguhan di dan tjara2 jang chas antara kedua bangsa Malaysia dan Indonesia.

Selesai.....



15-12-1967.

Selesai upatjara penjerahan itu nampak pak Harto dan Dubes Ya'coub bertjakap2 dengan serious jang berlangsung tjukup lama.

+ Sambutan Dubes2 Norwegia
Axel Hansen dan Tan Sri
Ya'coub.

Selesai menjerahkan surat2 kepertjajaannya, Dubes Norwegia Axel Ivar Lucien Moltka Hansen mengatakan, hubungan kedua negara akan terus dikembangkan terutamadibidang perdagangan, chususnja dibidang maritim. Dalam hal ini Pd. Presiden Djendral Soeharto menjatakan bahwa adanja kerdjasama antara kedua negara teristimwa dalam kemaritiman, berarti keuntungan bagi kedua negara. Djendral Soeharto menjatakan yakin pula bahwa Norwegia akan dapat menanamkan modalnja di Indonesia.

Sementara itu Dubes Malaysia Tan Sri Ya'coub setelah menjerahkan surat2 kepertjajaannya mengatakan, bahwa Malaysia mengikuti dengan saksama perkembangan di Indonesia sebagai salah satu negara tetangganya, disamping terus menerus mengikuti usaha2 jang dilakukan oleh Pd. Presiden Djendral Soeharto untuk mentjapai kedudukan jang sempurna bagi keuntungan rakjat.

Dikatakannya, walaupun dalam waktu jang sangat singkat, Djendral Soeharto telah berhasil melaksanakan beberapa rentjanjang menguntungkan rakjat.

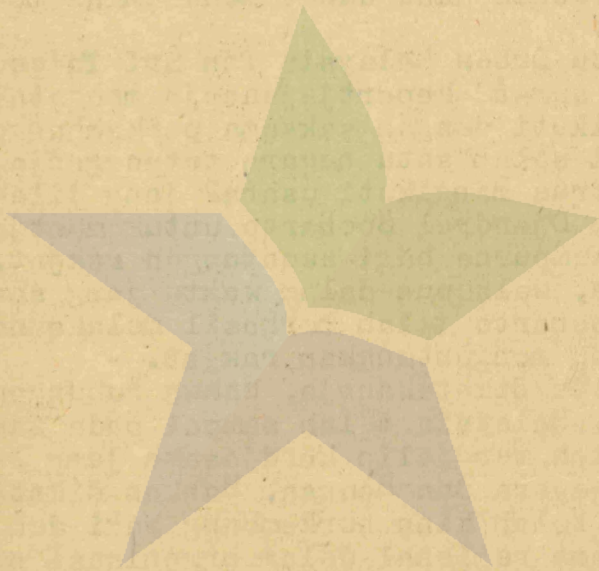
Dalam pada itu dikatakannya, bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia telah sampai pada zaman jang baru dimana telah terdjalin kerdjasama jang bermanfaat bagi kedua negara dan Bangsa. Bahkan dikatakan nja, kerdjasama tsb telah kian berkembang bagi dengan terdjalinjakerdjasama regional dalam organisasi negara2 Asia Tenggara Asean.

+ Pak Harto kepada Ya'coub

Mendjawab pidato sambutan Tan Sri Yacoub, Pd. Presiden Djendral Soeharto menjetudjui utjapan Dubes Malaysia itu dan mengakui terdjalinnya persahabatan jang akrab dan mesra. Djendral Soeharto menjatakan bahwa dengan kerdjasamajang baik itu bangsa kita sanggup menanggulangi segala hambatan dan tantangan dalam menudju tertjapainja tjita2 kita bersama jaitu kesedjahteraan bagi rakjat masing2.

Dalam mengikuti perkembangan di Malaysia, demikian Pak Harto, saja tidak ragu2 untuk menatakan bahwa Malaysia dapat memenuhi segala aspirasi rakjat nja, dan bahwa Malaysia dapat memberikan sumbangan jang

berbarga.....



U M U M :

18-12-1967.-

berharga dalam mempertabankan perdamaian, chususnja di Asia Tenggara, dilandasi oleh semangat dan tjita2 ASEAN.

Dengan hadirnja Jang mulia sebagai utusan negara sahabat rakjat Indonesia, demikian Pak Harto lebih landjut, hubungan antara Malaysia dan Indone-sia akan lebih berkembang lagi dan segala persoalan jang sama2 kita hadapi akan dapat diselesaikan de-ngan lebih lantjar.

(R012/VS/PAB/XII/67).-

----- SI -----

PD PRESIDEN LANTIK DUBES RI DI NEDERLAND
MAJDJEN TASWIN

Djakarta, 15 Desember (PAB).-

Pd. Presiden Djendral Soeharto selesai me-nerima surat2 kepertjajaan Dubes2 Norwegia dan Ma-laysia di Istana Merdeka tclah pulamelantik Major Djendral Taswin ^{Matadinigrat} untuk memangku djaba-tan Duta besar RI untuk Nederland.

Dalam pidato pelantikannja, Pd. Presiden me-mesankan kepada Majdjen Taswin, sesuai dengan garis jang diberikan oleh MPRS telah mendjelaskan hubungan antarapolitik luar negeri dan kepentingannasional, oleh karena politik luar negeri kita merupakan aspek luar negeri dp. pandangan dan tjita2 bangsa.

Pelaksanaan tjita2itu haruslah diwujudkan setjara bertahap berentjana dan terutama harus dida-sarkan kepada kemampuan riil jang kita miliki, maka bagaimanapun mulia tjita2 itu, selamanja harus merupa-kan tjita2 jang harus terlaksana wudjudnja.

Selandjutnja Pak Harto mengatakan, bagi negara kitajang sedang membangun kembali potensi2 nja, maka pelaksanaan politik luar negeri jang efek-tip akan dapat dimanfaatkan dengan tepat untuk mem-pertjepat proses membangkitkan potensi ekonomi nasi-nal.

Ditegaskan oleh Pak Harto, kita harus be-rani melibat kenjataan dan kesulitan, serta berani pula mengatasi kesulitan2 itu dengan tjara2 jang re-alistis dan pragmatis jang merupakan pola pemikiran Orde Baru.

Menurut Pak Harto, kenjataan jang kita ba-dapi dewasa ini adalah mengatasi kemunduran2 ekonomi untuk mampu segera melaksanakan pembangunan nasio-nal. Kesulitan2 itu akan tetp kita atasi dengan me-ngarahkan segenap potensi kita didalam negeri,
akan.....



U M U M :

- 16 -

15-12-1967.-

akan tetapi untuk mempertjepat usaha mengatasi kesulitan itu maka kita sudah selajaknja memanfaatkan prinsip2 dasar kita sebagai bangsa jang mendeka dan berdaulat. Demikian Pd. Presiden Djendral Soeharto.

)
(R012/VS/PAB/XII/67).-

----- S1 -----

KURSUS ORIENTASI PETUGAS ANAK TUNA SOSIAL
DIBUKA

Djakarta, 15-12-Desember (PAB).-

Dalam rangka peringatan Dasawarsa hari Sosial ke 10 kemarin pagi telah dibuka kursus orientasi petugas anak tuna sosial oleh Sekretaris Djendral Departemen sosial Rusiah Sardjono di Debajoran Djakarta. Kursus diadakan untuk mentjari pola2 peningkatan usaha2 sosial dalam bidang kesedjahteraan anak tuna sosial.

Kursus diikuti oleh 21 peserta petugas pelaksana dari Departemen Sosial, perwakilan sosial Bandung, Semarang, Djogja, Klakah Djawa Timur dan akan berlangsung hingga tanggal 20 Desember jang akan datang. Tema peringatan hari Sosial tahun ini, mempergiat usaha Lembaga Sosial Desa (LSD) untuk membangun negara sosialis Pantjasila.

(R044/A023/PAB/XII/67).

----- S1 -----

SJAMSUDIN SUTAN MAKMUR MENINGGAL DUNIA

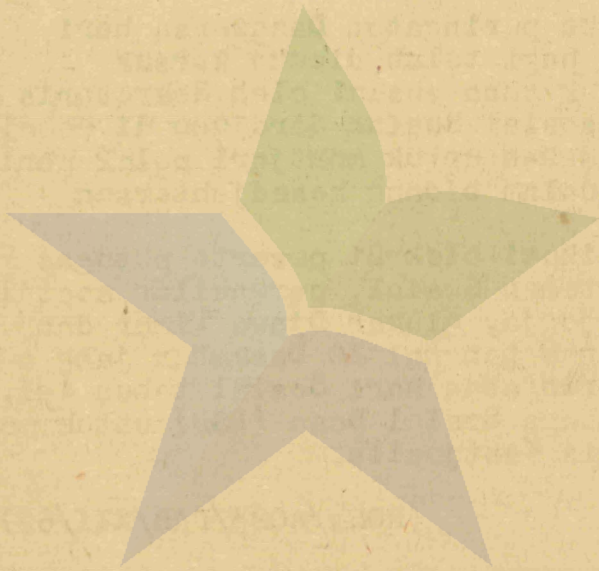
Djakarta, 15 Desember (PAB).-

Sjamsudin Sutan Makmur, bekas anggota parlemen dan bekas Menteri Penerangan pada Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955-1956, telah meninggal dunia kemarin malam, dirumah sakit umum Djakarta.

Djenasah dibaringkan dirumah almarhum Djalan Matraman Dalam 2 /udjung, dan akan dikubumikan siang ini di Djakarta.

(R044/A023/PAB/XII/67)

----- S1 -----



U M U M :

15-12-1967.-

PANGlima DJENDRAL POL. SUTJIPTO JUDODIHARDJO
TERIMA UPUSAN PENGABDI HUKUM

Djakarta, 15 Desember (PAB).-

Panglima Angkatan Kepolisian Djendral Polisi Sutjipto Judodihardjo kemarin pagi telah menerima keputusan Pengabdi Hukum yang dipimpin oleh ketuaannya Sri Widodojati Notoprodjo SH. Pada kesempatan itu Sri Widodojati Notoprodjo telah menyampaikan harapan untuk bekerjasama dengan pihak AKRI antarlain mengenai survey yang akan dilakukan dilingkungan kepolisian serta tokoh2 pikiran yang dapat diberikan oleh AKRI dalam rangka mewujudkan negara Hukum.

Panglima AK dalam tanggapannya setjara spontan menjambut baik dan akan membantu usaha pengabdi Hukum tersebut. Didjelaskan bahwa mengenai materi Undang2 yang akan mengatur hubungan fungsional antara semua alat penegak Hukum diandjurkan dibentuknja suatu team antara Pengabdi Hukum dan staf AKRI, Staf Adjaksanaan, Staf Kehakiman dan Pengadilan untuk merumuskannya.

Menurut djendral Pol. Sutjipto Judodihardjo mengenai Undang2 Pokok Kepolisian dan Adjaksanaan, hendaknya menunggu undang2 tentang hukumatjara pidana. Achirnja ditegaskan, bahwa semua itu akan berhasil asal untuk keadilan dan kebenaran.

(R044/A023/PAB/XII/67).-

---oSo---

MASALAH DJUDI MENDJADI PEMBITJARAAN
HANGAT GUBERNUR - WARTAWAN

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Gubernur DCI Djaya Ali Sadikin dikediamannya Djl. Taman Suropati Selasa malam jl telah mengadakan rapat khusus bersama para Wartawan Djakarta. Selanjutnja Gub. Ali Sadikin mengumumkan bahwa rapat dischors sementara, untuk berbuka puasamakan kolak dan sembahjang Magrib.

Dalam landjutan rapat stb Gubernur Sadikin memberikan pendjelasan tentang anggaran belandja Pem. DCI Djaya tahun 1967 dan 68 sekaligus anggaran belandja tiga tahun termasuk rentjana pembangunan kesedjahteraan Karyawan, dan lampu warna warni untuk para wisatawan dalam dan luar negeri.

Sebagai....



U M U M :

15 - 12 - 67

Sebagai puntjak atjara telah terdjadi pembi-
tjaraan jang sangat dengan para Wartawan mengenai per-
djudian di Petak Sembilan, jang telah menghasilkan
uang Rp.68 djutaselama3 bulan ini. Untuk melandjut-
kan diskusi mengenai djudi itu, pertemuan diundur
sampai minggu depan.

(R/2, A-15/PAB/XII/67)

---oSo---

MONUMEN KODAM BRAWIDJAJA AKAN
DIBUKA RESMI

Malang , 15 Desember(PAB).

Menurut interlokal jang disampaikan oleh war-
tawan PAB di Malang mengabarkan bahwa, Pangdam setem-
pat akan membuka resmi monumen Kodam Brawidjaja jang
terletak dikota Malang, pada hari Djum'at pagi ini.

Ferlu ditambahkan bahwa, monumen tsb adalah
hasil karya warga Kodam Brawidjaja dibawah pimpinan
Letkol. Mustopo.

(R/47/Int/PAB/XII/67)

---oSo---

S E L E S A I



E K U I N :

15-12-67.

PERNJATAAN PP. Kapni:

IKUT SERTAKAN HATTA, SJAFRUDIN, SUMITRO,

DAN KASIMO.

* Untuk membentuk Dewan Per
timbangan Ekonomi.

Djakarta, 15 Desember (TAB).

Musjawarah Pimpinan Pusat Kesatuan Aksi Pengusaha Nasional Indonesia (P.P.KAPNI) pada sidangnya tanggal 12 Desember 1967, dalam menanggapi akan dibentuknya Badan Konsultasi Ekonomi antara Pemerintah dan Swasta menjatakan pendiriannya sebagai berikut :

Menghargai langkah2 yang ditempuh oleh Pd. Presiden Djenderal SOEHARTO dalam mengadakan pertemuan dengan pengusaha2 Swasta Nasional untuk mendengar pendapat2, pemikiran2 dari Pengusaha Swasta Nasional mengenai kbidjaksanaan Ekonomi Keuangan Pemerintah khususnya dan perbaikan Ekonomi rakjat umumnya.

Selanjutnya dengan Pernyataan P.P. KAPNI tanggal 18 Nopember '67, PP Kapni minta agar Pd. Presiden Djenderal SOEHARTO langsung meningkatkan pembentukan Badan Konsultasi Ekonomi dalam bentuk Dewan Pertimbangan Ekonomi Keuangan yang bertugas membantu Pd. Presiden dalam :

- a. Meninjau seluruh Kbidjaksanaan2 Ekonomi Keuangan dan Peraturan2 Pelaksanaannya yang tidak tepat sebagai alat guna mentjabai sasaran2 perbaikan Ekonomi.
- b. Merumuskan kbidjaksanaan Ekonomi Keuangan Negara atas landasan2 dasar yang ditetapkan MPRS dan memorandum DPR-GR untuk tertjabainya program jangka pendek dibidang Ekonomi yaitu pengendalian laju inflasi, bentjukupan pangan, peningkatan export, perbaikan prasarana Ekonomi dan bentjukupan pangan sebagai satu kesatuan yang pelaksanaannya menjadi tanggung djawab Pemerintah, Swasta dan rakjat seluruhnya.

* Ikut sertakan Hatta, Sjafrudin, dll.

Dalam rangka pembentukan/penjusunan Dewan Pertimbangan Ekonomi didalamnya didudukkan :

- a. Sektor Pemerintah.
- b. Pengusaha2 Swasta Nasional.
- c. Ahli2 Ekonomi/Keuangan Negara, antara lain: Dr. Hatta, Sjafruddin Prawiranegara SH, Dr. Sumitro, I. J. Kasimo dll.

Sehingga Dewan itu nantinya dapat membantu Pd. Presiden merumuskan kbidjaksanaan2/peraturan2 Ekonomi Keuangan yang dapat dipertanggung-djawabkan pelaksanaannya baik dari segi Pemerintah, maupun masyarakat demi kepentingan Nasional. Demikian PP KAPNI.

(R050/Rel/TAB/XII/67).



E K U I N :

15 - 12 - '67

INSTITUT ILMU KEUANGAN DIRI SIK N

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Di Direktorat Jenderal PTIP, Djum'at pagi ini diadakan penandatanganan Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pembentukan "Institut Ilmu Keuangan", yang merupakan pengintegrasian antara Perguruan Tinggi yang ada dalam Departemen Keuangan RI.

Perlu diketahui bahwa Perguruan Tinggi maupun Akademi yang ada dalam lingkungan Depkeu adalah : Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara (SPKN), A3N, APBN, ATN, A3P, APK. Dan untuk menjaga mutu Perguruan Tinggi tsb merosot Institut Ilmu Keuangan tersebut bekerdja sama dengan Universitas Indonesia.

(R.038/A-12/PAB/XII/'67)

---(atn)---

RAB TAHUN 1968 DAERAH KOTAMADYA JOKJAKARTA

+ Diperosentsekan setjara
terperintji.

Jokjakarta, 15 Desember (PAB).

Rentjana Anggaran Belandja (RAB) tahun 1968 Daerah Kotamadya Jokjakarta, telah disampaikan Pemerintah Executif setjara resmi kepada Sidang Pleno DPRDGR di Djl. P. Diponegoro 27, pada 8 Des 1967 yang lalu. Dalam pidato pengantar RAB Tahun 1968 itu Pd. Welikoat, Kepala Daerah Kodya Jokjakarta Letkol Soedjono A.J. telah mengadakan intro dan retrospeksi dalam tubuh Pemerintah Executif; dengan mengemukakan kekurangan2 dalam tahun yang silam, dengan maksud untuk disempurnakan pada tahun yang mendatang.

Kekurangan2 itu tidak sadja meliputi bidang organisasi dan administrasi yang dirasakan kurang seimbang dengan gerak dynamikanja masyarakat dalam alam yang melangkah menuju kemodernisasi tata susunan masyarakat kota; masih kurang lintjanja dalam mengembangkan inisiatif - karena masih adanja rasa dan perasaan takut salah, sehingga menimbulkan sipat yang ragu2, masih kurang dalam melaksanakan span of control dalam beberapa bidang, belum mampunja dengan setjara maksimal untuk menjadikkan service yang baik kepada masyarakat dan warga kota; belum djuga tertjapai nja menggali sumber2 ber2 Incom Daerah setjara maksimal. Kekurangan2 itu, selandjutnja dikatakan, merupakan tantangan bagi Pemerintah Kodya Jokjakarta dan karyawannja, untuk lebih giat bekerdja mengahdiAnpera, djustru oleh sebab itu semua saran2 Badan Legislatif yang sebanjak 19 point pada sidang nja jl. telah pula diterima dengan sepenuh hati untuk dikerdjakan atas dasar kemampuan Pemerintah Executif.

Sebagai.....

Section 1, Chapter 1, Article 1 of the Constitution of the United States. This section defines the powers of the legislative branch, specifically the House of Representatives. It states that the House shall be composed of Representatives and Delegates, chosen every second Year by the People of the several States. The number of Representatives shall not exceed one for every thirty Thousand Persons.

Section 2, Chapter 1, Article 1 of the Constitution of the United States. This section defines the powers of the executive branch, specifically the President. It states that the President shall hold Office for four Years, and shall be eligible for one Term only.

Section 3, Chapter 1, Article 1 of the Constitution of the United States.

This section defines the powers of the judicial branch, specifically the Supreme Court. It states that the judicial Power shall extend to all Cases arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States. It also defines the jurisdiction of the lower federal courts.

Section 4, Chapter 1, Article 1 of the Constitution of the United States. This section defines the powers of the states. It states that the States shall have the same Powers as the States before the Union, and that the United States shall guarantee to every State a Republican Form of Government. It also states that the States shall not enter into any Treaty, Alliance, or Confederation with a foreign State.

Sebagai kompensasi kekurangan tersebut di atas, telah pula disampaikan laporan mengenai langkah2 madju yang telah dikerjakan dan dirintis, seperti diadakan up-grading dalam bidang pengetahuan dan kerdja sama dengan BPA-UGM, up-grading dalam mental/Agama, kerdjasama dengan IAIN Susunan Kalidjaga, telah dibentuk nya kantor Penghasilan Daerah untuk meningkatkan income Daerah, pengumpulan data2 dalam bentuk statistik dan grafik untuk bahan City Planning, merintis pembentukan City Planning Board untuk menudju Open Management Policy dalam bidang pembangunan, meningkatkan gerak sosial dalam mengatasi manusia tuna wisma/karya serta merintis "Funds & Forces" masyarakat dalam bidang pembangunan dan gerak sosial. Demikian a.l. kata pendahuluan yang telah disampaikan Pd. Walikota Kodya Jakarta, selanjutnya mengenai RAB tahun 1968 ini, yang dijadikan titik tolak penjurusan adalah didasarkan hasil income penggalian sumber2 penghasilan daerah, yaitu 50% untuk belandja routine dan

50% untuk belandja Pembangunan. Belandja Routine diprojektikan sebagai berikut : untuk gaji pegawai 40% , ini diprintji : gaji pegawai diharapkan dibangun full dari daerah tingkat I DLJ, uang perdjalan 15% dari belandja pegawai, uang restubusi 20%. uang lembur 5%, uang kesedjahteraan pegawai 40%, gaji pegawai dan pekerdja organik Kodya 20%, sedang untuk belandja benda yang sebesar 60%, adalah pengeluaran untuk prasarana kelantjaraan berputarnya Roda tata Pemerintahan Kota, agar dapat memberikan service yang maksimal kepada masyarakat.

Belandja yang bukan Routien yaitu: untuk belandja pembangunan sebesar 50% yaitu diambil dari hasil Income Daerah dari hasil Ireda /Ipeda dan bukan Ireda /Ipeda , yaitu untuk kelanjutan Rehabilitasi djalan2 50% , penambahan ruang SD 40%, irigasi peningkatan produksi 10% , sedang hasil bukan dari hasil Ireda/Ipeda digunakan untuk gedung Pemerintah Daerah Kodya sebesar 50%, gedung yang memberi efek ekonomi , keindahan kota 10% angkutan 10%.

Perlu diketahui bahwa tjara penjurusan RAB tahun 1968 ini berbeda dengan tahun yang lalu, tetapi mempunyai tjiri yang khas, yaitu merupakan concensus bersama antara Executif - P4D - dan Panitia Anggaran DPRDGR, jadi bukan hanya penjodoran konsepsi dari pihak Executif, juga bukan wends begroting, tetapi djustru mengutamakan tujuan pengorbanan yang riil, pragmatis serta konkrit dan tidak meninggalkan Balanced Budget. Pemerintah Executif dengan segala daya untuk mentjapai tujuan concensus bersama itu, tanpa meninggalkan landasan dan system penjurusan RAB tahun 1968, ini dapat dilihat dalam usaha meningkatkan Income Daerah sebesar 20% dari Income Daerah tahun 1967 .

Demikian Humas Kodya DLJ.

(R.011/Kd/PAB/XII/'67)



E K U I N :

15-12-67.

LAPORAN UMUM SEKITAR HASIL RAKER
KORESTEDA.

Djakarta, 15 Desember (TAB).

Sebagai landjutan dari pada musjawarah Kerdja antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diselenggarakan pada tanggal 27 Djuli 1967 di Djakarta, dimana hasilnya nampak positif baik yang menjangkut ruang lingkup Nasional maupun regional, maka Pemerintah menganggap perlu untuk meningkatkan lagi hasil yang telah ditjapai itu dengan jalan mengadakan rapat kerdja antar Pemerintah Pusat dan Daerah dimulai dengan rapat kerdja di Indonesia Bagian Timur, sebagaimana tertjantum dalam instruksi Pedjabat Presiden R.I. No. 12/1967 tgl. 22 Nopember 1967.

Tudjuan daripada rapat kerdja tersebut adalah untuk mengarahkan perhatian dan kegiatan masyarakat pada usaha memperbaiki ekonomi pada umumnya dan pengembangan serta peningkatan produksi pada khususnya, menuju tertjapainya Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi yang menjeluruh, dengan antara lain melaksanakan peraturan-perundangan dari berbagai kebidjaksanaan dibidang perekonomian di daerah berazaskan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi ditingkat pusat maupun daerah.

Dengan dioulihkannya serta ditingkatkannya kegiatan ekonomi pada umumnya, maka berarti :

- a. Dapat membuka kesempatan kerdja yang lebih luas untuk menampung pengangguran dan tenaga kerdja yang tiap tahun meningkat jumlahnya,
- b. dapat merupakan landasan utama kerarah peningkatan pendapatan rakyat, yang berarti pula meningkatkan daya beli rakyat yang pada dasarnya merupakan prasarat bagi pembangunan ekonomi,
- c. dapat berangsur-angsur mengurangi ketergantungan Indonesia dari Luar Negeri setjara ekonomis, yang berarti pula memperkuat ketahanan ekonomi Negara dan Bangsa Indonesia.

Dalam rangka kebidjaksanaan ekonomi, sesuai dengan ketetapan MPRS ke XXIII/1966 setjara bertahap melalui fase penjelamatan dan rehabilitasi, dimana kita telah memasuki pula fase konsolidasi, maka Pemerintah telah dirintis sedjak 3 Oktober 1966, yang akan merupakan tindakan penjemputan disemua bidang termasuk bidang prasarana.

Dalam ketetapan MPRS No. XXIII/1966 pasal 66 diinjatakan demi berhasilnya pelaksanaan beratjam program, rencana, kebidjaksanaan, dan lain-lain, maka perlu segera disempurnakan perangkat pemerintahan, yang mampu merealisasikan programnya, kepada siapa rakyat meletakkan kepercayaannya dan harapannya. Menganggap perlu mengadakan tindakan landjutan jg
Dan.....



E K U I N :

15-12-67.

Dan dalam rangka pelaksanaan demokratisasi ekonomi dalam bentuk desentralisasi, debirokratisasi, dekonsentrasi untuk mentjapai perimbangan pembangunan ekonomi antara pusat dengan daerah dalam bentuk programing, planning dan prioritas, maka suatu kebidjaksanaan dalam tindakan jang saling isi mengisinja, saling memanfaatkan, cross fertilization antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan djaminan lantjar litjinja djalan demi tertjapainya tindakan2 pemulihan dan peningkatan kapasitas produksi nasional.

Karena daerah adalah daerahnja Pusat dan pusat adalah pusatnja daerah, untuk ini kita perlukan kebidjaksanaan jang mendjamin koordinasi, integrasi dan synchronisasi antara pusat dan daerah hingga terwujud suatu kesatuan ekonomi bagi seluruh wilayah Indonesia.

MASALAH2 POKOK EKONOMI?
KEUANGAN DAN INDUSTRI DI
DAERAH INDONESIA BAGIAN
TIMUR.

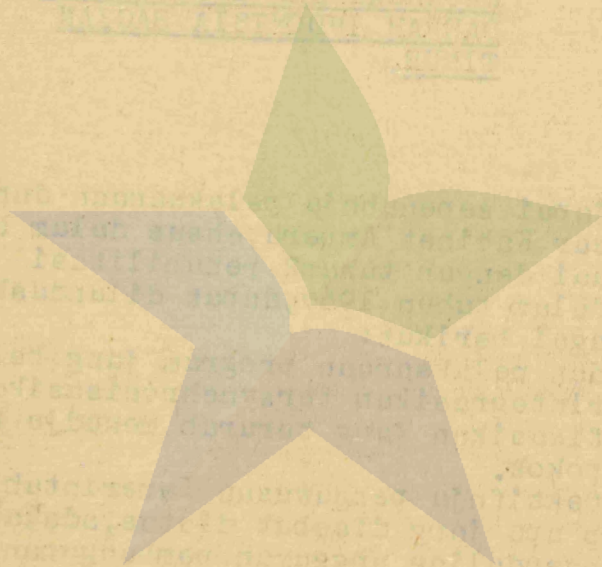
A. Produksi .

1. Bahwa belum tertjapai sepenuhnya pelaksanaan dari pada strategi dasar Kabinet Ampera, chsus dalam bidang ekonomi sesuai dengan tahap2 rehabilitasi dan konsolidasi dalam tahun 1967, dapat dilandaskan pada faktor2 sebagai berikut:
 - a. Perentjanaan dan pelaksanaan program jang belum sepenuhnya terintegrasikan tersynchronisasikan dan tersimplifikasikan jang terarah menudju kepada sasaran pokok.
 - b. bahwa belum efektifnja penguasaan Pemerintah Pusat terhadap apa jang disebut diatas, adalah disebabkan pengendalian anggaran pembangunan jang dalam banjak hal belum rasionil, dan belum efektif.
Djuga aparatur Pemerintahan belum tjukup memenuhi persjaratan mental Orde Baru.
 - c. Masjarakat didaerah2 masih terlalu banjak disibukkan dengan persoalan2 dan issue2 politik dari pada soal2 ekonomi dan pembangunan.
 - d. Kerusakan hebat daripada prasarana2 jang ada, hingga sukar untuk semata-mata mengadakan rehabilitasi tanpa mengadakan investasi physik prasarana tertentu.
 - e. Inventarisasi modal baru untuk pengolahan keajaun alam Indonesia menundjukkan bahwa kemampuan untuk rehabilitasi dan investasi belum tjukup dan terbatas sekali adanya, persediaan modal operatif untuk dapat menggerakkan kembali aparat2 produksi agar dapat memenuhi kondisi2 jang efektif.

2. Kemungkinan.....

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
LABORATORY OF PHYSICAL CHEMISTRY
CHICAGO, ILLINOIS

RECEIVED
MAY 10 1950
PHYSICAL CHEMISTRY



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
LABORATORY OF PHYSICAL CHEMISTRY
CHICAGO, ILLINOIS

2. Kemungkinan pembatjaannya adalah :

(a) Memperbesar penerimaan untuk keperluan pembiayaan, melalui tjara-tjara :

- Anggaran Pembangunan,
- Kredit-kredit untuk modal kerdja dan modal rehabilitasi dengan suku bunga jang wadjar, jang tidak terlalu menbebani produksi.

(b) Memperbesar modal investasi jang sangat terbatas sekali itu dengan djalan penanaman modal asing sebagai modal komplementair dan suplementair potensi modal dalam negeri, sekaligus untuk mentjiptakan ruang kerdja jang lebih luas.

3. Peranan pusat dan daerah harus dilihat dari sudut wilayah hukum Indonesia sebagai satu negara kesatuan dengan satu kesatuan ekonominya; Pusat sebagai unsur koordinasi dan penentuan kebidjaksanaan melalui keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan, sedangkan daerah-daerah sebagai unsur-unsur pelaksana.

Dengan memperhatikan faktor-faktor koordinasi, integrasi, synchronisasi dan syimplifikasi, maka semua keputusan dan peraturan jang diturunkan kedaerah-daerah, wadajib ditaati dan dilaksanakan dengan sepatutnja.

Daerah-daerah Indonesia bagian Timur sesungguhnya adalah kaya akan sumber-sumber alamnja, sekalipun ada variasi dalam djenis kekayaan tersebut. Ada daerah jang subur dan kaya akan produksi pangan, seperti Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Daerah-daerah lainnja merupakan penghasil kopra, tjengkoh, rempah-rempah, hasil-hasil laut, ternak hasil-hasil hutan, kaju untuk bangunan dan seni keradjinan. Akan tetapi karena kekurangan tenaga baik skilled maupun unskilled, serta modal, belum seluruh kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan setjara berhasil guna.

Sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka daerah Indonesia bagian Timur jang kaya tersebut merupakan potensi ekonomi jang besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia.

Tidak sedikit penerimaan negara jang dihasilkan dari kekayaan daerah Indonesia Bagian Timur, misalnja devisa hasil transaksi export.

Sumbangan Daerah Indonesia Bagian Timur terhadap Pusat akan bertambah besar, bila seluruh kekayaan alamnja telah dimanfaatkan setjara maksimal dengan bantuan penuh dari pemerintah pusat. Bantuan jang diharapkan dari pemerintah pusat ialah biaya/investasi modal untuk eksplotasi berbagai matjan kekayaan alam hingga produktif, jang setjara mutlak harus ditundjang oleh suatu keadaan prasarana jang sempurna, teristimewa komunikasi dipertimbangkan bahwa keadaan prasarana didaerah Indonesia dibagian Timur berbeda dengan keadaan di Djawa jang sudah djauh sempurna sehingga dalam menghadapi tahap stabilisasi bukan sadja perlu diadakan rehabilitasi, tetapi djuga investasi dibidang prasarana, chususnja komunikasi.



Daerah Irian Barat sebagai salah satu anggota keluarga wilajah Indonesia bagian Timur, perlu memperoleh perhatian yang wajar dari sesama tetangganya. Kekurangan dan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh daerah Irian Barat dalam bidang pangan dan perhubungan laut merupakan suatu tantangan daerah-daerah tetangganya. Sulawesi dapat membantu dengan beras. Maluku dengan alat-alat perhubungan lautnya dapat membantu menghubungkan daerah-daerah Selatan dan daerah-daerah Utara Irian Barat setjara teratur dan terdjamin, sedangkan fasilitas pemeliharaan alat-alat pengangkutan laut dalam bentuk dok dapat memberi pelajaran yang dapat mendjamin kontinuitas pelajaran antar daerah.

4. Sesuai dengan ketetapan MPRS No. XXIII/1966 yang menjabutkan harus adanya penggalangan dari pada tiga unsur ekonomi nasional yaitu pemerintah, koperasi dan swasta, maka untuk mewujudkan penggalangan tersebut, perlu dibentuknya Dewan Industri dari pusat sampai ditiap daerah sebagai forum untuk :
 - (a) unsur pembantu pemerintah, (b) tempat dialog antar unit ekonomi pemerintah maupun swasta, (c) counterpart terhadap pengusaha swasta asing.
5. Rapat kerdja menganggap perlu adanya penghidjaan daerah-daerah kritik seperti misalnya Danau Tempe, Gunung Agung serta daerah kaju Tjendana Nusatenggara.

B. Distribusi.

1. Maritim.

Dibidang Perhubungan laut di Indonesia bagian Timur mengalami kesulitan-kesulitan berhubung :

- a. keadaan fasilitas-fasilitas pelabuhan kurang baik.
- b. alat-alat telekomunikasi djugamasih sangat kurang.
- c. organisasi dan pelaksanaan perhubungan laut belum baik, sehingga terasa atau menyebabkan tidak terdjaminnya trafik pelajaran tetap ke-Daerah tersebut.

Kesulitan sektor perhubungan laut ini hanya bisa teratasi apabila fasilitas-fasilitas pelabuhan direhabilitasi dan diperbaiki dibidang organisasi/management.

Disamping itu perlu adanya keserasian antara pola perdagangan dan pola pelajaran.

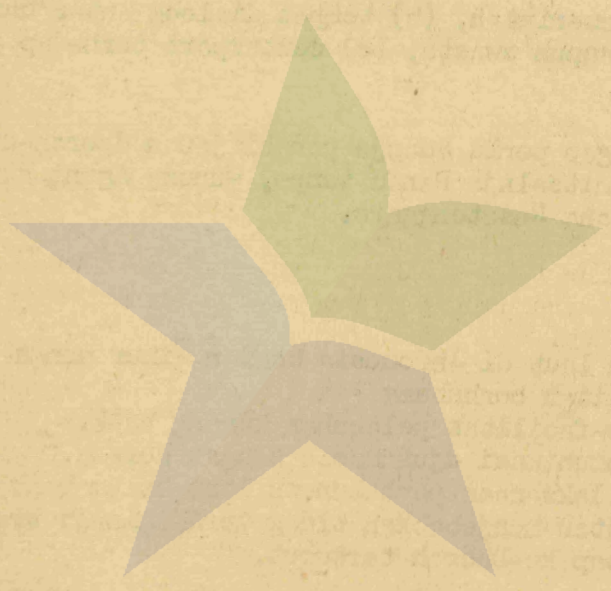
Untuk mengatasi kekurangan angkutan laut didaerah Irian Barat baik untuk pelajaran pantai maupun untuk keperluan pelajaran dengan daerah Indonesia lainnya maka diputuskan untuk segera diusahakan pengiriman dua buah kapal P.N. "Pelni" type "TO" kedaerah tersebut.

Menyemi kesulitan bahan bakar untuk daerah-daerah Indonesia bagian Timur, pemertjehannya akan diadakan dengan koordinasi antara Departemen Maritim, P.N. Pertamina dan Pemerintah Daerah.

2. Perhubungan.

Bidang perhubungan yang menjangkut bidang angkutan djalan raya, perhubungan udara dan pos serta telekomunikasi masih dirasa adanya kekurangan-kekurangan didaerah Indonesia Bagian Timur, sehingga perlu diusahakan perbaikan-perbaikan yang berupa :

a. menambah...



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. Some fragments are visible, such as "The following...", "The first...", "The second...", "The third...", "The fourth...", "The fifth...", "The sixth...", "The seventh...", "The eighth...", "The ninth...", "The tenth...", "The eleventh...", "The twelfth...", "The thirteenth...", "The fourteenth...", "The fifteenth...", "The sixteenth...", "The seventeenth...", "The eighteenth...", "The nineteenth...", "The twentieth...", "The twenty-first...", "The twenty-second...", "The twenty-third...", "The twenty-fourth...", "The twenty-fifth...", "The twenty-sixth...", "The twenty-seventh...", "The twenty-eighth...", "The twenty-ninth...", "The thirtieth...", "The thirty-first...", "The thirty-second...", "The thirty-third...", "The thirty-fourth...", "The thirty-fifth...", "The thirty-sixth...", "The thirty-seventh...", "The thirty-eighth...", "The thirty-ninth...", "The fortieth..."

- a. menambah fasilitas-fasilitas pos dan telekomunikasi.
- b. perbaikan-perbaikan landasan pesawat terbang.
- c. rehabilitasi jembatan-jembatan dan jalan.

Mengingat usaha-usaha rehabilitasi sangat tergantung atas tersedianya anggaran maka diharapkan adanya kerja sama dari Daerah-daerah untuk memberi perhatian terhadap usaha-usaha Pemerintah Pusat dalam perbaikan bidang ini.

Meningkatkan kelantjaran perhubungan ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan perdagangan dan produksi.

3. Perdagangan.

- a. Perkembangan dan kelantjaran perdagangan antar daerah dan pulau akan banyak terpengaruh oleh keadaan perhubungan sehingga dapat dipahami apabila keadaan perdagangan di daerah Indonesia Bagian Timur yang terdiri dari pulau-pulau dan yang keadaan fasilitas-fasilitas perhubungan perhubungannya serba kurang akan mengalami kemunduran-kemunduran.

Persoalan ini akan teratasi apabila sektor-sektor perhubungan dan maritim dapat direhabilitasi, disamping penghapusan hambatan-hambatan lain seperti misalnya : pungutan-pungutan.

- b. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.:009 tahun 1967 harus dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dan jiwa peraturan tersebut.
- c. Soal perkoperasian yang penting adalah bahwa perlu dilaksanakan dengan njata Undang-undang tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
Dalam hal ini pada tahap sekarang perlu adanya pembinaan, pembimbingan dan pengawasan thd koperasi-koperasi sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dibidang ini.

C. M O N E T E R.

1. PENGERTIAN PUNGUTAN-PUNGUTAN DIDAEARAH.

Daerah dapat mengadakan pungutan-pungutan berupa pajak dan retribusi berdasarkan Undang-undang no.11 tahun 1967 Lembaran Negara No.56 tahun 1957 dan Undang-undang no.1 tahun 1957 Lembaran Negara no.57 tahun 1967.

Lapangan pungutan ialah lapangan yang belum dipergunakan oleh Negara atau oleh Daerah tingkat atasan.

Prosedure pengesahan pungutan-pungutan tsb ialah diusulkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Daerah kepada Presiden melalui Pemerintah Daerah yang lebih atas dan Menteri Dalam Negeri.

Pada.....



Pada saat ini banyak Daerah yang mengadakan pungutan-pungutan yang belum memenuhi persyaratan untuk menjadi sah saja pungutan Daerah tsb.

Berhubung Dengan itu telah dikeluarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 51/EK/Kep./10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 yang melarang Penguasa Daerah baik militer maupun sipil untuk tanpa ijin Pemerintah Pusat mengadakan pungutan-pungutan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap pengusaha-pengusaha hasil-hasil bumi ekspor.

Pula Instruksi Presidium Kabinet No. 23/EK/IN/11/66 tanggal 19 Nopember 1966 yang menginstruksikan untuk menghentikan segala bentuk pungutan terhadap bahan ekspor ketjuani yang telah diatur berdasarkan perundang-undangan Pusat.

Mengingat bahwa hingga saat ini penertiban pungutan-pungutan yang tidak memenuhi prosedur pengesahan belum terlaksana dengan baik, maka Pemerintah akan mengambil kebidjaksanaan untuk melaksanakannya tahap demi tahap.

Pada tahap pertama maka semua pungutan-pungutan yang belum memenuhi persyaratan pengesahannya, diwajibkan dalam waktu tiga bulan untuk dilaksanakan pengesahannya sesuai prosedur yang berlaku ialah merupakan keputusan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dan di ajukan kepada Menteri Dalam Negeri. Pada Lampiran I di buat pungutan-pungutan yang tersebut diatas.

Bagi pungutan-pungutan yang jelas-jelas bertentangan dengan policy Pemerintah Pusat dalam usaha meningkatkan perekonomian pada umumnya harus ditjabut.

Disamping itu mulai saat ini dilarang mengadakan kenaikan tarif dari pungutan-pungutan yang sah apalagi mengadakan pungutan-pungutan baru. Dalam pada itu, djika berdasarkan pertimbangan ekonomis Pemerintah Pusat dianggap perlu menghapuskan suatu pungutan maupun membebaskan seseorang atau sesuatu perusahaan dari pembayaran pajak dan lain-lain pungutan Pusat, maka Daerah dilarang untuk menggantikan pungutan yang dihapuskan tadi dengan pungutan Daerah ataupun meniadakan pembebasan tersebut diatas dengan membebani mereka dengan pungutan Daerah baru yang menurut sifatnya sama dengan pungutan yang dihapuskan maupun yang dibebaskan, tadi.

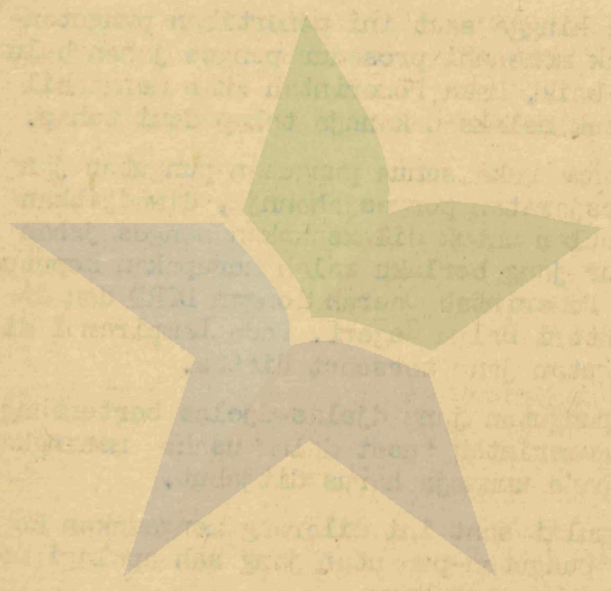
Untuk penertiban ini di Pusat dibentuk Team bersama antara Dep. Dalam Negeri, Dep. Keu dan Dep. Hankam Team ini djuga akan memberi pedoman-pedoman penggunaan hasil ADQ/IPEDA oleh daerah-daerah.

Bidang Cess.

Dikandung maksud untuk meningkatkan kemungkinan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan-bahan ekspor melalui cess.

Pungutan....

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly obscured by a watermark.



E K U I N :

15 - 12 - 67

Pungutan cess ini akan merupakan suatu bentuk pungutan atas bahan-bahan ekspor t. sb.

Penggunaan hasil cess ialah untuk :

- a. research technologisich.
- b. peremadjaan dan pembinaan.
- c. trade promotion dan marketing research.
- d. Daerah bagi pembiayaan peningkatan kualitas dan kuantitas bahan-bahan ekspor.
- e. membayar iuran Badan Internasional yang bersangkutan dengan bahan-bahan ekspor tadi.

Karena Daerah telah memperoleh bagian dari pungutan cess ini, maka untuk selanjutnya Daerah tidak akan mengadakan pungutan-pungutan lagi atas bahan-bahan ekspor tadi.

Dengan demikian maka akan timbul penjederhanaan pungutan dalam arti satu kali, dan keseragaman untuk seluruh Indonesia.

Chusus mengenai cess atas kopra dengan padjak kopra yang berlaku di Indonesia bagian timur yang berdasarkan peraturan Negara Indonesia Timur ditetapkan bahwa Cess atas kopra itu menggantikan pungutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan no.009/SK/I/1967, dan padjak kopra akan ditarik kembali.

BIDANG PERBANKAN.

PERKREDITAN

a. KREDIT KEPADA PETANI.

Dalam rangka peningkatan produksi pangan, maka perkreditan kepada petani dalam hubungannya dengan usaha BIHIS perlu mendapatkan perhatian sektor perbankan, khususnya B.I Unit II yang mengutamakan usahanya dalam bidang rural.

b. KREDIT KEPADA KOPERASI :

Mengingat bahwa pada umumnya permodalan koperasi masih lemah dan mengingat perlunya pembinaan perkoperasian di Indonesia, maka BIH telah menentukan syarat-syarat bagi pemberian kredit kepada koperasi.

SOAL B.E. :

a. B.E. KREDIT

Pendjualan BE kredit melalui tjabang tjabang Bank Sentral (BNI Unit I) di Daerah-daerah akan lebih ditingkatkan.

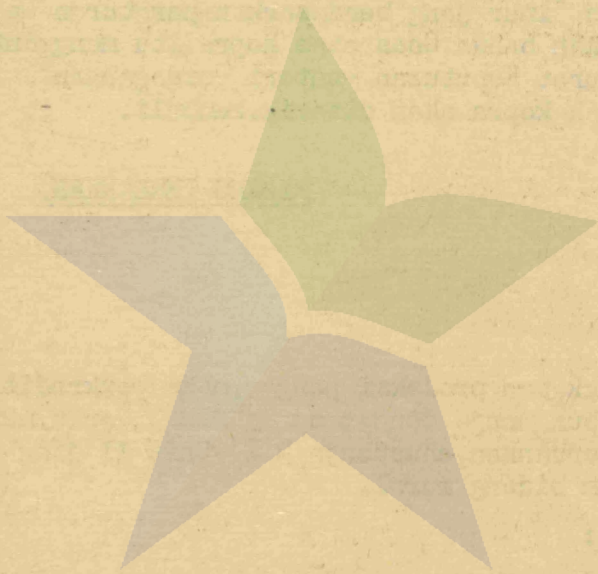
b. B.E. UJUN :

Guna mempertjepat perputaran modal dari eksportir, maka tjabang Bank Sentral di daerah bersedia melakukan pembelian BE ujun.

BANKING ARRANGEMENTS.

Didalam menundjang kegiatan Daerah Daerah untuk meningkatkan perdagangan Internasional, maka Bank Sentral akan mengusahakan adanya arrangements antara Bank bank di Indonesia dan Bank bank di luar negeri (misalnya perdagangan antara Timor Dilly dan Timor Kupang).

PEMBUKAAN TJABANG ...



15 - 12 - 1967

E K U I N :

PEMBUKAAN TJABANG BANK SENTRAL :

Pada dasarnya di tiap ibukota Daswati I akan dibuka tjabang Bank Sentral yang bertugas melajani pekerdjaan pekerdjaan pemerintah dan pembinaan perbankan didaerah bersangkutan.

PENJIMPATAN UANG NEGARA :

Uang Negara yang merupakan bahagian daripada anggaran pendapatan dan belandja Negara harus disimpan pada Bank Sentral atau tjabangnja .Apabila disuatu tempat tidak terdapat tjabang Bank Sentral, maka Bank Pemerintah lainnja akan ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut. Uang Negara yang ditempatkan pada suatu Bank Komersil tidak boleh dipergunakan sebagai sumber pemberian kredit.

PERDAGANGAN :

Prioritas Nasional :

Bilamana ada suatu barang eksport yang djuga diperlukan sebagai bahan baku untuk produksi dalam negeri, apalagi kalau barang itu merupakan salah satu bahan pokok kehidupan rakyat, maka perlu diinjatakan bahwa keperluan langsung didalam negeri mendapat prioritas.

Kopra misalnja adalah tjentoh yang baik sekali. Walaupun eksport perlu ditingkatkan, tetapi tersedianja minyak kelapa bagi rakyat dengan harga yang lajak adalah lebih perlu. Chusus mengenai kopra difahami oleh daerah daerah penghasil kopra bahwa perlu disediakan persentase tetap bagi industri dalam negeri sebagai perimbangan terhadap djatah kopra yang harus di eksport.

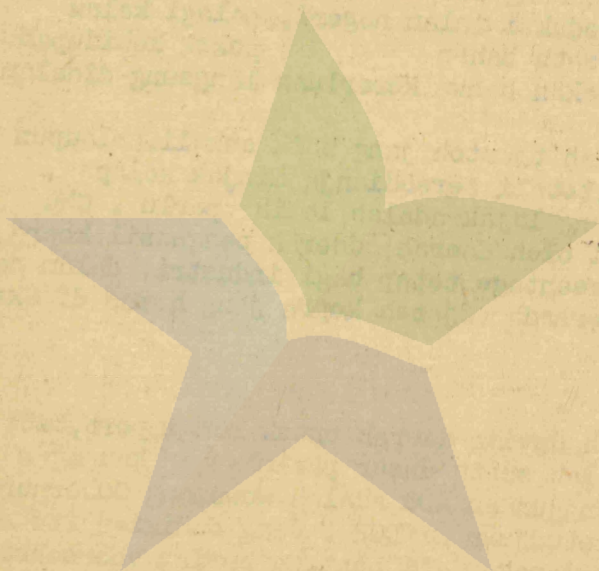
A D O :

Walaupun ADO adalah devise daerah untuk mengimport, tetapi pada hakikatnja ini adalah suatu unsur perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Penggunaan ADO adalah wewenang Gubernur/Kepala Daerah dengan persetujuan DPRDGR. Yang demikian itu meliputi wewenang untuk mempergunakan ADO buat pemberian voorschot dan penggunaan ADO sebagai garansi kredit, Semur wewenang tersebut harus tertjermah didalam anggaran belandja daerah yang meliputi satu tahun anggaran.

Oleh sebab daerah yang mengeksport memperoleh ADO, sedangkan daerah penghasil barang eksport yang tidak mengeksport sendiri tidak memperoleh ADO maka daerah penghasil harus dirugikan.

Kedua Daerah tersebut hendaknja menjelesaikan pembagian ADO itu sendiri, tetapi bilamana ada persengketaan maka Menteri Dalam Negerilah yang akan menjelesaikannja sebagai wasit. Bilamana suatu Daerah memerlukan dengan sangat barang-barang diluar daftar BE/ADO yang berlaku, maka hal ini dapat di adjukan kepada Menteri Perdagangan untuk mendapat keputusan setjara khusus. Pembagian ADO antara Dati I dan Dati II supaya diatur oleh Gubernur/Kepala Daerah dengan persetujuan DPRDGR.

KOMPENSASI....



E K U I N :

15 - 12 - '67

KOMPENSASI A D O

Keinginan dari Sulteng untuk mengadakan kompensasi ADO atas perdagangan antar pulau kopra dapat dimengerti, tetapi harus diakui pula, bahwa itu akan menaikkan harga kopra untuk produksi bahan-bahan pokok penting dalam negeri, berupa minyak goreng, sabun, margarine, yang oleh rakyat selalu diharapkan harga-harganya yang relatif murah.

Meskipun demikian masih dapat dipertimbangkan untuk menggantikan sistem kompensasi ADO dengan sistem "Cross" yang pada akhirnya akan diarahkan ke usaha-usaha menaikkan produksi dari pada komoditi tersebut.

B E R A S :

Sulawesi Selatan mengusulkan sesuatu persentase "laba lebih" dari beras yang akan dijual ke daerah-daerah lain dan Nusa Tenggara Barat mengusulkan, supaya beras yang akan diperhitungkan dengan hutang pada BNI Unit II, harganya disesuaikan dengan harga pasar yang riil. Mengenai hal ini akan dipertimbangkan untuk memberikan semangat premi produksi dalam rangka sistem stock beras nasional dan dislokasi beras setjara merata diseluruh Indonesia.

D. IRIAN BARAT :

Sampai sekarang di Irian Barat masih berlaku karantina Ekonomi berdasarkan keputusan Presiden No.44 tahun 1967, sehingga tidak semua peraturan-peraturan ekonomi pusat bisa dilaksanakan semua. Persoalan-persoalan yang dihadapi Irian Barat meliputi :

1. Pengadaan dan penyaluran bahan-bahan pokok, terutama beras dan bahan bakar, akan selalu mendapat perhatian pemerintah.

2. Pengangkutan laut dan angkutan udara, akan segera diusahakan penambahan fasilitas perhubungan (penambahan kapal laut dan kapal udara).

3. Produksi dan perbaikan prasarana lain, diusahakan dengan pemanfaatan dana IBB dan dalam batas-batas tertentu Pemerintah akan turut membantunya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN :

1. Harus diakui adanya kebutuhan akan suatu iklim baru bagi produksi, sehingga dapatlah didorong swa-upaja rakyat melalui kekuatan-kekuatan ekonomi didalam masyarakat. Perubahan struktur ekonomi dari alam serba negara (etatisme) kearah demokrasi ekonomi, memerlukan perubahan mental dengan dorongan agar timbul daya-tjipta, daya-rangsang rakyat, sehingga meningkatkan daya-behli rakyat melalui usaha produksi.

2. Masih sangat dirasakan perlunya peningkatan koordinasi dan keserasian, khususnya synchronisasi dari pada kegiatan-kegiatan:
 - a. antar-bidang, terutama bidang moneter, distribusi dan produksi
 - b. antar-departemen-departemen di pusat, terutama diantara departemen-departemen dibidang produksi.
 - c. antar-daerah, dengan penjelenggaraan pembinaan produksi setjara gotong-rojong.
 - d. antar-pusat dan daerah, dalam menuju tertjapainya Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi yang menjeluruh.

3. Masih pula...



3. Masih pula dirangsangkan perlunya pengederhanan (simplifikasi) daripada peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur dalam bidang administrasi.
4. Usaha dibidang produksi membutuhkan pengertian, dukungan dan dorongan dari bidang moneter, dan dalam hal ini kita menundjung pendekatan setjara produksi (production approach), yang memberikan bantuan berupa proteksi dalam bentuk keringanan perpajakan dan biaya masuk, fasilitas perkreditan dan keringanan-keringanan lainnya yang bersifat mendidik dan mendorong tanpa mengarah kepada proteksi berlebihan (over protection), dengan keharusan mempertinggi mutu management, efficiency, dan produktivitas. Bahkan titik berat harus diletakkan dalam tahun 1968 pada penekanan biaya tidak langsung (over head cost) didalam proses produksi.
5. Khususnya dalam menghadapi tahun 1968, iklim produksi harus membawakan kejayaan tertjaptanya tahun 1968 sebagai penjepluran (afroding) hasil-hasil kita selama tahun 1967 dan sebagai rehabilitasi bidang produksi, oleh karenanya di usulkan tahun 1968 sebagai tahun produksi sebagai titik tolak tahun pembangunan.
6. Usaha rehabilitasi mendasarkan diri pada urutan prioritas dari strategi dasar Kabinet Ampara yang mengutamakan produksi pangan serta industri agraria dan industri lainnya yang menunjang produksi tersebut, sehingga usahanya di arahkan pada rehabilitasi atau memulihkan potensi aparat produksi sampai puncak-puncak prestasi yang tertjapai pada waktu yang lampau.
7. Disamping menaikan daya produksi tidak boleh pula dilupakan mempertinggi mutu produksi dan menaikan produktivitas, dengan mendasarkan diri pada hukum-hukum ekonomi, antara lain kemampuan untuk menarik modal sendiri dan modal pihak ketiga dengan timbulnya kepertjajaan dari luar atas kebijaksanaan perusahaan yang bersangkutan. Bantuan tersebut tidak hanya dari modal dalam negeri tetapi juga modal dari luar negeri melalui penanaman modal asing sehingga modal tersebut menjadi pelengkap ekonomi nasional dan ekonomi daerah.
8. Sesuai dengan ketetapan MPRS No. XXVIII/1966 yang menjebutkan harus adanya penggalangan daripada tiga unsur ekonomi nasional yaitu pemerintah, koperasi dan swasta, maka untuk mewujudkan penggalangan tersebut, perlu dibentuknya Dewan Industri dari pusat sampai ditiap daerah sebagai forum untuk :
(a). unsur pembantu pemerintah, (b). tempat dialog antar unit ekonomi pemerintah maupun swasta, (c) counterpakt terhadap pengusaha swasta asing.
9. Mengingat keadaan geografis dari Indonesia Bagian Timur yang bersifat maritim, serta kekayaan alam potensial yang menunggu untuk di olah sehingga merupakan wilayah Indonesia yang mempunyai harapan besar, maka perhubungan laut dan udara merupakan satu keharusan untuk mewujudkan kekayaan tsb dalam usaha menuju masa raket adil dan makmur.
10. Pelaksanaan rehabilitasi ekonomi untuk daerah Irian Barat diraksudkan untuk mendapatkan pula dana bantuan PBB sebesar US \$ 30.000.000. Untuk mempertjepat tahap rehabilitasi ekonomi, bantuan dalam bentuk kerdjasaan dari daerah-daerah Indonesia Timur lainnya perlu lebih di tingkatkan.

11. Usaha...



E K U I N :

5 2 167

11. Usaha rehabilitasi dan pembangunan, selain memerlukan modal, membutuhkan pula tenaga tenaga ahli berupa para sardjana. Penjebaran para tenaga ahli harus disesuaikan dengan intensitas usaha rehabilitasi dan pembangunan sehingga diperlukan relokasi para sardjana. Untuk memungkinkan pelaksanaan rencana tersebut daerah daerah yang membutuhkan perlu menjediakan fasilitas fasilitas sesuai kebutuhan mereka, sebagai perangsang.
12. Untuk mengatasi kekurangan modal dalam negeri untuk membangun ekonomi nasional maka kepada rapat kerdja telah diberi penjelasan tentang kemungkinan memperoleh modal asing lewat perdjandjian perdjandjian pindjaman penanaman modal itu. Ditegaskan pula dari pihak pemerintah pusat bahwa didalam keadaan ekonomi di negara kita dewasa ini penanaman modal asing adalah lebih banyak menguntungkan buas daerah daerah daripada pindjaman (kredit).
13. Raker Koresteda sebagai kelanjutan raker antara pemerintah pusat dan daerah bulan Djuli yang lalu, diharapkan merupakan langkah madju lagi kearah keserasian yang mutlak untuk mendjanin kelanjutan program program dibidang ekonomi umumja dan dibidang produksi pada khususja.

PENGORBAAN SEBAGAI PRASJARAT UNTUK MEMPERKURTI TATA
MASJARAKAT JANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN PANTJASILA

1. PENGERTIAN DAN TUJUAN ORDE BARU :

Untuk mengedjar suatu hidup yang demokratik berdjiwa Pantjasila, yang dapat menegakkan angga² prasarajat¹ ja berdasarkan atas hak hak azasi manusia diperludkan adanya pembina an yang positif dan konkrit. Segi segi kerangka kerangka yang beraneka merupakan tantangan dalam usaha untuk bertjita³ tata hidup yang kita idam idamkan. Kondisi kondisi prasarajat dalam Orde Lama merupakan faktor utama yang harus dirobak dan dalam hal ini diperlukan intensitas untuk menapertjepat masa peralihan kedalam kondisi kondisi Orde Baru.

Dengan digantinya Kabinet Dwikora ja telah disempurnakan lagi oleh Kabinet Ampera dibawah pimpinan Djenderal Soeharto, maka kehidupan politik menjadi lebih demokratik, dan dalam menetjahkan masalah masalah sosial dan pemerintahan lebih digunakan suatu pendekatan yang djudjur dan pragmatis dalam arti bahwa kesamaanja itu di arahkan pada kepentingan dan kebahagiaan rakyat, demikian pula dalam kehidupan ekonomi dan pembangunan tampak dalam pendekatan menentri berbagai bagai masalah nasional dan internasional, jaitu bahwa segala kebijaksanaan Kabinet Ampera ditanggapi berdasarkan satu pandangan yang rasional dan rasional serta berdasarkan atas penilaian yang sehat dalam hubungan sebab dan musababja.

Orde Baru merupakan tata hidup yang beresendi pada ketertiban, kedjudjuran, keharmonisan dan keadilannya dapat dilihat dari berbagai sudut, jaitu sudut politik, ekonomi, sosial, intelektual, ideologi, filsafat, sosial psikologis, hukum, moral, moral hukum, moral kepertjajaan, dan Hanka. Untuk merealisasikan tata hidup tersebut pertama tama harus didjanin bahwa aparat eksekutif dan legislatif dalam tingkat nasional dan tingkat regional, serta pimpinan kekuatan kekuatan sosial faham benar benar dan memiliki aspirasi aspirasi yang serasi dengan djiwa Orde Baru itu.



Ditamping itu pengetrapan Orba itu sendiri harus mengarah pada usaha dan tindakan yang setjara operasional meliputi.

a. pengetrapan Orba sebagai satu sikap mental yang ditunjukkan kepada manusia manusia (para pendukung Orde itu).

b. pengetrapan Orba dalam proses daripada hubungan antara manusia dan antara golongan pada umumnya sebagai aspek yang dinamis dan demokratis daripada masyarakat;

c. pengetrapan Orba sebagai satu sistem yang meliputi aspek politik, sosial, ekonomi, hukum dan Hankam yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan.

Dalam masa transisi pengorbanan, dimana warisan Orde Lama belum terkikis habis, maka praktek² golongan serta pribadi sendiri menimbulkan gejala kearah penjelewaran yang merugikan masyarakat baik materiil, maupun yang dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum; demikian pula ada golongan tertentu yang ingin menjadikan para pejabat eksekutif dan legislatif, serta pimpinan usahawan untuk menggantungkan dirinya pada golongan tersebut, maka dengan demikian timbulah perbuatan² yang koruptif dan merugikan Negara.

Berdasarkan azas keadilan dan ketertiban dalam mengarahkan tata-hidup sesuai dengan tji² Orba, maka gejala² dan perbuatan² demikian perlu segera diberantas. Pertama-tama wadajib diusahakan untuk mempertjepat proses transisi pengorbanan dengan mengadakan penertiban disegala bidang setjara operasional.

Bersamaan dengan itu perlu diatur tata tertib yang menjamin kelancaran segala kegiatan Pemerintah dan masyarakat.

Dasar dari tertjajannya ketertiban ialah adanya ketentuan² baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sebagai pegangan dalam melaksanakan tindakan² yang diamut dan dipatuhi oleh semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena ketentuan² dimaksud meliputi bidang yang beraneka ragam dalam kehidupan masyarakat, maka setjara menjeluruh perlu ketentuan² tersebut dinilai, diatur

dan diawasi sesuai dengan tingkat kedudukan dan ruang lingkup kewenangan.

Untuk menjamin adanya ketatalaksanaan yang baik, dalam arti micro maupun macro, perlu adanya tindakan² yang dapat mengarahkan tertjajannya tujuan Orba, yaitu yang disebut tindakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi atau disingkat : KISS .

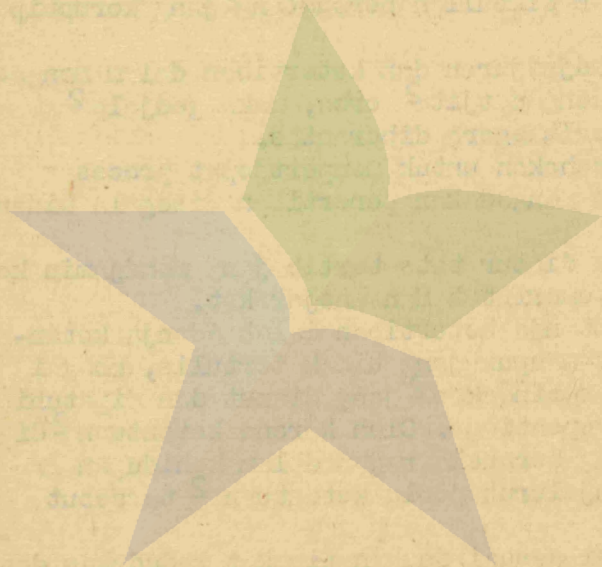
II.

II Pengertian tentang KISS.

K. Koordinasi, ialah usaha untuk menjusun sesuatu perentjanaan sedemikian rupa, sehingga dalam pelaksanaannya bagian yang satu dengan yang lain (masing² bagian) dapat saling melengkapi dan saling membantu.

I. Integrasi, ialah usaha untuk menjatukan tindakan dari berbagai instansi, sehingga keseluruhannya dapat merupakan suatu kebulatan aktivitas yang terarah kepada satu tujuan yang telah ditentukan.

S.....



S. = Desentralisasi, ialah usaha untuk menajesaikan segala aktivitas dalam melaksanakan suatu rentjana, sehingga baik ruang maupun waktu dilakukannya aktivitas tsb dapat menimbulkan suatu keserasian.

S. = Simplifikasi, ialah usaha untuk menajederhaskan segala bidang kegiatan, sehingga sudah untuk dimengerti dan dilaksanakan oleh umum, luwes (flexible) dan mengilangkan unsur birokrasi yang tidak perlu jaitu kepada pihak yang tidak berkepentingn dalam bidang ekonomi ini dilarang ikut tjampur dalam urusan ekonomi.

III. Penetapan KISS dalam kata
kelembagaan

Berdasarkan ... Ketetapan MRS No XXI/MRS 1966, Pene-
rintah harus ... meletakkan tanggung djawab otonomi riil dan seluas²
nja dalam tangan Pemerintah Daerah, disamping mendjalankan poli-
tik dekonsentrasi sebagai komplemen yang vital.

Ini berarti bahwa prinsip desentralisasi didjalankan
dengan tjara memberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan me-
ngurus rumah tangganya sendiri dari Pemerintah Pusat kepada Pene-
rintah Daerah atau daerah tingkat atas kepada Daerah tingkat
bawah.

Sekalipun otonomi riil seluas²nya harus diserahkan
kepada Daerah dan adanya prinsip desentralisasi dari pengurusan,
namun dalam ikatan negara kesatuan, tanggung djawab terakhir
dalam keseluruhannya tetap ada pada Pemerintah Pusat, sebagai
penanggung djawab tertinggi Pemerintahan Negara Republik Indo-
nesia. Oleh karena itu Pemerintah Pusat tetap memegang hak dan
kewenangan dibidang penetapan Kependidikan, Perrentjanaan, Koordi-
nasi dan Penyelenggaraan; sedang pelaksanaannya di daerah dilimpahkan
kepada Kepala Daerah.

Untuk dapat menjamin adanya terlaksananya Pemerintahan yang
baik dan luwes, maka dengan menajerintikan prinsip KISS Kepala
Daerah mempunyai dwi fungsi jaitu a. sebagai alat Pemerintah
Pusat; b. sebagai Pemerintah Daerah.

Sebagai alat pemerintah pusat Kepala Daerah mempunyai
hak dan wewenang:

1. memegang pimpinan kebijaksanaan politik politislonil untuk melaksanakan politik Pemerintah Pusat dalam menjelenggarakan keamanan dan ketertiban umum;
2. memegang pimpinan dalam menjelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara djawatan pemerintah pusat didaerah dan antara djawatan tsb dengan pemerintah Daerah;
3. melakukan pengawasan atas djalannya Pemerintahan Daerah,
4. Mengatur dan melaksanakan tugas lain yang diserahkan kepada oleh Pemerintah Pusat.

IV. KISS untuk menjamin kerdja
sama antar daerah dibidang e
konomi.

Didalam kehidupan sehari-hari, tidak selamanya daerah dapat
melangsungkan hidupnya tanpa mengadakan hubungan dengan Daerah
lainnya. Dalam rangka KISS ini hubungan kerdja sama antar Dae-
rah dapat ditingkatkan, antara lain: a. saling mengisi kebutuhan po-
kok, b. kerdja sama untuk sesuatu tujuan bersama.
Demikian pula apabila dalam kerdja sama ini terjdadi perbedaan per-
dapat, supaya diselesaikan sendiri dengan penuh saling pengertian
dan toleransi.

Apabila.....



15-12-1967

EKUIIN:

Apabila perbedaan pendapat, ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh daerah² yang bersangkutan, masalahnya diserahkan penjele saianja pada Menteri Dalam Negeri untuk Daerah² tingkat I dan pada Gubernur Kepala Daerah untuk Daerah² tingkat II.

V. Masalah² yang timbul karena Kiss dan peratjehannya.

1. Hubungan vertikal antara Pusat dan Daerah.

Telah tjukup peraturan perundangan jg mengatur hubungan Kiss antara Pusat dan Daerah. Namun masih terasa adanya kurang keser siah hubungan tsb.

Hal ini disebabkan antara lain karena Pemerintah Pusat melihat segala sesuatu dari scope nasional, sedangkan Daerah karena ke adaan jang mendesak seringkali hanya memikirkan kepentingan Da erah saja. Keadaan ini sering menimbulkan konflik kepentingan antara Pusat dan daerah. Konflik-konflik sematjan ini dapat diatasi dengan djalan² para¹ Gubernur Kepala Daerah sering me ngadakan konsultasi/kontak dengan Menteri Dalam Negeri;

- sistia laporan Daerah jang kontinue;
- sistim pengawasan jang efektif;
- Daerah diberi wewenang untuk membuat peraturan² pelaksana an untuk menjesurikan materi peraturan pusat dengan kondisi daerah.

; Koordinasi Intra Daerah.

Pada umumja masalah jang timbul dalam bidang ini adalah koor dinasi djawatan² vertikal oleh Gubernur Kepala Daerah karena ketjenderungan djawat² tersebut untuk langsung berhubungan dengan Departemennja masing² dengan kurang memperhatikan kedu dukan Kepala Daerah.

Kepentingan ini dapat diatasi dengan djalan:

- menegaskan bahwa kedudukan djawatan² vertikal di Daerah ada lah teknis - administratif berada langsung dibawah pembinaan Menteri atau Departemennja masing² dan tiktis operasional berada dibawah kepala Daerah.
- Kepala Djawatan Vertikal wadjib melaporkan keadaan umum djawa tannja kepada Gubernur Kepala Daerah.
- mentertibkan hubungan antar Gubernur/Kepala Daerah dengan djawatan² didaerahnja sesuai dengan Instruksi Presiden No.05 tahun 1967 tentang Bentuk kerdjasama dan Tata kerdja aparatur Pemerintah di Daerah.

(R048/Rel/PAB/67).-



E K U I N :

14-12-67.

MENTERI PERDAGANGAN TERIMA KUNDJUNGAN
GUBERNUR SULUT.

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Menteri perdagangan Majdjen M. Jusuf Rabu pagi ini telah menerima kunjungan Gubernur Sulut, Brig. Djen. H.V. Worang beserta staff ciruangan kerjanya.

Dalam pertemuan tersebut telah diadakan pembicaraan dan tukar pikiran sekitar hasil Raker Koreseda Indonesia bagian Timur yang baru ini telah berlangsung di Denpasar Bali. Terutama telah dipikirkan bagaimana meningkatkan serta merealisasikan keputusan Raker menjadi suatu kenyataan bagi pembangunan daerah Indonesia bagian Timur umumnya dan Sulawesi Utara khususnya. Dalam hubungan ini, Menteri Jusuf telah menandatangani kesediaannya untuk mengusahakan dan memberikan bantuan sedialah mungkin untuk merealisasikan usaha pembangunan daerah Indonesia bagian Timur umumnya, dan usaha dibidang distribusi pada khususnya.

Demikian diberitakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Departemen Perdagangan.

(R08/Rel/PAB/XII/67).

---in---

LPS TERIMA SUMBANGAN RP. 83.000

Djakarta, 15 Des. (PAB)

Lembaga Pembinaan sosial (LPS) kemarin pagi di Dkt telah menerima dari menteri sosial Tambunan sumbangan sebesar 83 ribu rupiah. Sumbangan berasal dari hasil pertunjukan Deutsche Tanzor oleh Goethe Institut yang kemudian akan diteruskan kepada Yayasan Pemeliharaan Anak-anak Tjatjat Djakarta. Senantiasa itu LPS telah pula menerima sumbangan 300 buah tjangkul dari konsul Jerman timur dan 400 Opoton pakaian dari Adwent.

(R044/A-23/PAB/XII/67)

----(w)----

INDONESIA PESAN 10.000 SEPEDA DARI BELANDA

Djakarta, 15 Des. (PAB)

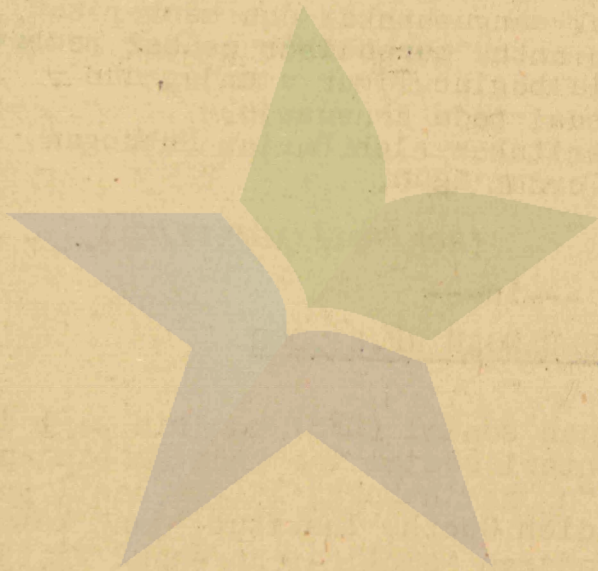
Dari negeri Belanda dikabarkan bahwa Indonesia telah memesan 10 ribu buah sepeda lagi pada pabrik sepeda Belanda Batavus yang terletak dipropinsi Geronveen. Sepeda pesanan itu mungkin baru dapat dikirim ke Indonesia dalam waktu tiga bulan mendatang ini.

Beberapa bulan terakhir, pabrik Batavus telah menjual 7.500 sepeda kepada Indonesia.

(R044/A23/BAB/XII/67).

----(w)----

S E L E S A I



RADJA KONSTATINE DIPETJAT OLEH KOL.PAPADUPULIS.

* Pemimpin Kabinet Junani yang baru.

Djakarta, 15 Desember (PAL).

Menurut berita2 dari Junani, Radja Konstatine telah mentjaba untuk menggulingkan pemerintahan militer dinegara tsb. Dalam siaran radio bergelombang pendek dari Junani Tengah, Radja Konstatine menjerukan kepada rakyat agar menjertainja dalam usaha2 untuk memulihkan kebebasan dan demokrasi. Dinjakatakannja, bahwa mulai sekarang ia tidak akan menerima baik pengingkaran dan tidak akan ada kompromi.

Sementara itu komunikasi antara Junani dengan dunia luar telah diputuskan dan keadaan terakhir dinegara tsb. tidak djelas. Akan tetapi menurut berita2 yang tersiar, Radja Konstatine telah membentuk suatu Kabinet Baru disuatu kota yang letaknja 90 km dari Athena. Kabarnya Petros Danakaras ditundjuk sebagai PM. Ia adalah bekas menteri pertahanan dan terkenal sebagai seorang tokoh yang sangat anti komunis serta dihormati oleh para pemimpin militer.

Menurut berita2 tsb. Radja Konstatine telah memerintahkan, agar Junta Militer melatakkan djabatannya dan memperkuat pemerintahnja dengan mengirimkan pasukan2 ke Athena, sementara para penerbang AU yang setia kepadanya melakukan penerbangan2 rendah diatas kota tsb.

Atas tindakan Radja Konstatine ini, pemerintah Junta Militer memberikan reaksinja dengan tjepat dengan mengerahkan pasukan2 gerak tjepatnja dan kendaraan2 berlapis baja kekota Athena untuk menguasai gedung-gedung pemerintah yang penting, termasuk Istana Radja, Stasiun Radio dan gedung2 kementerian. Senapan2 mesin dipasang diatas gedung kementerian luar negeri.

Dalam pada itu siaran Radio Athena mewartakan, bahwa Radja Konstatine telah disesatkan oleh kaum oportunis dan menjatakan, bahwa Angkatan Bersendjata Junani bertekad untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Selanjutnja Radio Athena menyiarkan komunikasi pemerintah yang menjatakan, bahwa Junta Militer menguasai penuh Junani dan bahwa usaha untuk menggulingkan pemerintah itu telah menemui kegagalan. Dikatakan seterusnya, bahwa Radja Konstatine melarikan diri dari desa ke desa.

Dalam hubungan ini K.B. Jugoslavia mewartakan terdjadinja pertempuran2 di Junani Tengah dan dipulau Kreta, sementara radio Larisja menyiarkan, bahwa 90% dari Angkatan Darat dan seluruh kesatuan Angkatan Udara serta Angkatan Laut berada difihak Radja.

Radja



LUAR NEGERI :

15 - 12 - 67.

+ Radja Konstatine dipctjat.

Siaran Radio Athena yang ditangkap hari Kamis pagi mewartakan, bahwa pemerintah Junta Militer telah memctjat Radja Konstatine dan melepas seorang pemangku mahkota. Menurut siaran radio tsb. kini telah dibentuk kabinet baru dibawah pimpinan Kolonel George Papadopoulos dan telah dilantik oleh Uskup Agung Athena.

(R027/H/PAB/XII/67).

PARLEMEN INDIA PERMAHANKAN BAHASA INGGRIS
SEBAGAI BAHASA RESMI DISAMPING BHS. HINDU.

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Madjelis Rendah Parlemen India hari Rabu telah menerima baik dengan suara terbanyak, RUU pemerintah yang banyak menimbulkan pertentangan, untuk mempertahankan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi disamping bahasa Hindu di India.

Setelah perdebatan sengit selama 5 hari Madjelis menerima baik RUU itu dengan perbandingan suara 224 lawan 75. RUU tsb. membenarkan dipergunakannya bhs Inggris sebagai bahasa resmi kedua selama daerah2 yang tidak ber bahasa Inggris menghendakinya.

Selama hampir 3 minggu, RUU tsb. telah mengakibatkan demonstrasi2 hebat serta kerusuhan2 terus menerus di India bagian Utara yang terutamanya berbahasa Hindi dan dibagian Tengah.

(R027/H/PAB/XII/67).

RAPAT PANITIA REGIONAL SE ASIA UNTUK
BAHAN2 BATJAJAN DI KUALALUMPUR.

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Panitia Regional se Asia untuk bahan2 batjaan akan melangsungkan pertemuan di Kualalumpur mulai tel. 19 sampai 21 Februari tahun depan dengan sponsor Unesco.

PM Malaysia Tengku Abdulrachman menyatakan, bhw rapat tsb. akan dihadiri oleh para utusan dari kelanjakan negara2 anggota Unesco di Asia, diantaranya Filipina, Djepang, Muang Thai, Indonesia dan Hongkong.

(R027/H/PAB/XIX/67).



PELUNTJURAN ROKET2 ANTARIKSA
SOVJET BERHASIL BAIK.

Dkt, 15 Des, '67 (PAB).-

K.B. Tass newartakan, bahwa serangkaian peluntjuran roket antariksa Sovjet dilautan Pasifik telah berhasil baik dan diachiri lebih tjepat dari pada jang direntjanakan semula. Peluntjuran2 itu jang menurut rentjana dilangsungkan mulai tgl 28 Nopember dan akan berakhir pada tgl. 30 Desember adalah rangkaian roket2 Sovjet ke- 4 di Pasifik dalam tahun ini.

Menurut K.B. Tass, daerah2 sasaran 450 km sebelah Barat Laut dan Selatan Sungai Mekhong kini telah terbuka bagi lalu-lintas laut dan udara.

Para ahli Militer Barat berpendapat, bahwa peluntjuran2 roket itu mempunyai tudjuan, yakni untuk mengudji roket2 baru jang lebih besar jang diluntjurkan Uni-Sovjet untuk mengiriakan seorang Manusia ke Bulan dan untuk memperluas pertjobaan2 Sovjet baru2 ini mengenai pendaratan kapsul2 Antariksa dilaut.

(R.027/H/PAB/XII/67).-

-----VS-----

VIETCONG USULKAN PEMBENTUKAN PEMERINTAH.
KOALISI VIETCONG-VIETSEL.

Dkt.15 Des, '67 (PAB).-

Front Pembebasan Nasional Vietsel, yakni sebuah Badan Politik Vietcong telah menjerahkan sebuah memorandum jang tebalnja 27 halaman kepada PBB untuk didedar kan kepada para utusan.

Menurut djubir PBB, memorandum tsb diserahkan kepada sekdjn U Thant oleh utusan Rumania pada hari Rabu. Ditambahkannya, bahwa dokumen itu lebih dahulu perlu diterdjemahkan dari bahasa Perantjis dan akan di-bagi2kan hari Kamis.

Menurut sumber2 PBB jang telah melihat dokumen tsb, dalam memorandumnja itu pihak Vietcong mengungkapkan keinginannya agar di Vietsel dibentuk pemerintah koalisi Vietcong-Vietsel.

(R.027/H/PAB/XII/67).-

.....VS.....



LUAR NEGERI :

15-12-67.

KORBAN GEMPA BUMI DI INDIA MENINGKAT
MENDJADI 172 ORANG.

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Angka kematian akibat gempa bumi di Koina-
gar di India Barat telah meningkat mendjadi 172 orang
dengan diketemukannya majat2 lagi didesa2 dan kota2
disekitarnja jang hantjur itu. Menurut para pedjabat
75 desa jang letaknja djauh didaerah pedalaman dan
dipuntjak2 bukit belum dikundjungi untuk diperiksa
apakah ada korban2 manusia disana.

Diterangkan, bahwa k.l. 600 orang mendapat
luka2, kebanyakan diantara mereka luka2 parah.

(R027/H/PAB/XII/67).

---in---

TIDAK ADA KAMP VIETCONG DIWILAJAH KAMBODJA.

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Menurut berita jang diterima dari Phompenh,
anggota2 Panitia Internasional untuk melakukan pengu-
wasan di Kambodja, hari Rabu telah mengadakan kundju-
ngan ke distrik Memot di propinsi Kompong Cham, dimana
oleh beberapa wartawan AS dilaporkan telah diketemu-
kannja baru2 ini bekas2 kamp Vietcong.

Menurut berita tsb setelah para anggota
Panitia itu melakukan penjelidikan jang seksama, me-
reka tidak mendapatkan adanja bekas2 kamp tsb.

(R027/H/PAB/XII/67).

---in---

677 SARDJANA AUSTRALIA PROTES
PERANG DI VIETNAM.

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Madjalah ilmu pengetahuan Australia dalam
penerbitannja hari Rabu di Canberra memuat pernjata-
an protes jang ditandatangani oleh 677 sardjana2
Australia terkemuka terhadap perang jang dilantjar-
kan oleh AS dan sekutu2nja di Vietnam.

Pernyataan tsb menuntut agar pemboman2
terhadap Vietara dengan segera diachiri, dilarangnja
penggunaan bom2 napalm dan ratjun terhadap rakjat
serta diambilnja tindakan2 untuk mengachiri peperan-
gan tsb. Diantara para penandatangan pernjataan
tsb terdapat C. Mohr, professor dalam ilmu physika
teoritis dari Universitas Melbourne, professor2 R.
Brown dan G. Swan, kedua2nja ahli kimia jang terkemu-
ka serta professor B. Johnson, sardjana geographi
jang ulung.

(R027/H/PAB/XII/67).

---in---



RAKJAT YAMAN DISERUKAN B E F S A T U.

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Radio Sana hari Rabu malam menyiarkan seruan panglima Angkatan Bersenjata Yaman, djenderal Hasan al Amri jang ditudjukan kepada segenap rakjat, agar bersatu padu mempertahankan Republik jang kini sedang menghadapi perlawanan dari pasukan2 keradjaan.

Meskipun dewasa ini tidak terdapat bahaya langsung jang mengantjam keselamatan Republik tsb., akan tetapi djalan2 raya tak benti2nja dipatroli oleh kesatuan2 bela diri Yaman dan sendjata2 telah dibagi bagikan kepada penduduk dipelbagai tempat guna dapat diturut sertakan dalam usaha2 menghadapi segala kemungkinan jang tak dikehendaki.

Dikota Sana sendiri, keadaanja padahari Rabu adalah tenang. Rakjat seperti biasa melakukan kewadji-bannja sehari-hari, sedangkan pasar2 jang merupakan pusat kegiatan perdagangan dikota tsb. tetap dibuka.

Dikota itupun tidak tampak bekas2 penembakan artileri, sedangkan didaerah2 pinggirannja tidak pula terlihat tanda2 akan terdjadinja pertempuran2 bersen-djata setjara besar2an antara pasukan2 Republik dan pasukan2 keradjaan.

(R027/H/PAB/XII/67).

M. U. PBB SETUDJI RESOLUSI JANG MENGANDJUR-
KAN AGAR RAKJAT OMAN DIBERI KEMERDEKAAN

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Dengan perbandingan suara 72 setuju lawan 18 menolak dan 19 abstain, Madjelis Umum PBB hari Rabu men-jetudjuj suatu resolusi mengenai Oman jang diadjukan oleh Panitia ke IV PBB jg menegaskan kembali hak rakjat Oman untuk menentukan nasibnja sendiri serta untuk memperoleh kemerdekaan. Resolusi tsb. selandjutnja menge-tjam Inggris atas tindakan2nja utk membentuk pemerintahan boneka didaerah tsb. Seterusnja resolusi itu menjerukan dihapuskanja pangkalan2 militer Inggris di Oman, menga-chiri tindakan2 pembalasan terhadap rakjat serta pembe-basan kembali semua tawanan2 politik.

Kepada segenap negara anggota PBB, resolusi tsb menjerukan agar memberikan bantuan seperlunja kepada rakjat Oman dalam perdjoeangannja memperoleh kemerdekaan dan kebe-basan dari Inggris serta mengandjurkan kepada Panitia Chu-sus PBB mengenai masalah kolonialisme untuk meneruskan perundingan2nja mengenai masalah Oman dan mempeladjar kemungkinan dibentuknja Panitia Ketjil jang khusus disa-rabi tugas menyelesaikan masalah Oman tsb. Kepada Sekdjen PBB U Thant Madjelis Umum PBB meminta utk menambil tin-dakan2 kearah terlaksananja resolusi2 jg telah diambil oleh Madjelis tsb. mengenai masalah Oman dan melaporkan hasil2 usabanja itu kpd sidang ke 23 M.U. pada tahun de-pan.

(R027/H/PAB/XII/67).



LUAR NEGERI :

15 -12- 67

TERUSAN SUEZ AKAN DIBUKA KEMBALI KALAU
ISRAEL TARIK PASUKAN2NJA DARI ARAB

Djakarta, 15 Des, (PAB)

Kepala Dinas penerangan RPA Moh. Hassan al, Zayat menjatakan hari Rabu di Kairo, bahwa Terusan Suez akan dibuka kembali hanya apabila Israel, telah menarik kembali pasukan2nja dariwilajah2 Arab ja didudukinja. Penegasan ini dikemukakannja dlm konferensi pers utk para wartawan asing jg diadakandiibu kota RPA tsb. Menurut Embi tJara sebab musababnja Terusan Suez itu ditutup oleh RPA. ialah karena Israel berusaha mendesakkan kemampuannja thd negara arab dengan tjan molantjarkan agresi, jg mengakibatkan dilumpuhkannya salah sebuah saluran internasional jg sangat penting. Diterangkan selandjutnja, bahwa pihak Israel telah menembaki dan merusak gedung2 administrasinja dan dan perlengkapan2 di Terusan Suez dengan maksud utk selama mungkin menjegah penggunaan kembali terusan tsb utk pelajaran internasional. (R027//PAB/XII/67/H)

----- (w) -----

TENTARA SEWAAN A SING DIKIRIM KE YAMAN UTK MENEMBUS
KAN KEONANAN2

Djakarta, 15 Des. (PAB)

PM Yaman Mohsin el Aini merogaskan bahwa angkatan bersendjata Yaman kini telah dapat menguasai keadaandinegerinja, Surat kabar "Al Ahbar" jang menyiarkan keterangan PM Aini tsb merwartakan selandjutnja, bahwa menurut PM Aini, sedjak dimulainja penarikan kembali pasukan RPA dari Yaman anasir2 anti Republik mulai mengkonsentrasikan pasukan2 di El Joufa dan Haulan serta djuga diwilayah disebelah Barat Sana.

Menurut PM Aini, pasukan2 anti pemerintah ini memiliki sendjata2 artileri berat dan menerima pula bantuan sendjata serta amunisi dalam djumlah besar2an dari pihak ketiga. Akan tetapi, meskipun demikian, pasukan2 bersendjata Yaman berhasil menalakkan dan melakukan pengajaran2 thd unit2 keradjaan jg merongrong jg pemerintah itu. Sementara

itu K.B. R.P. Aina merwartakan bahwa Mahkamah agung Yaman minggu depan akan bersidang utk mendengarkan ketetapan Ahmad Wl Sibagi, bekas Menteri keradjaan dan penjabat berkuatan2 anti republik dibagian barat Yaman. Sibagi telah ditangkap oleh unit2 tentara Republik Yaman ketika baru baru ini melantjarkan operasi pembersihan thd pasukan2 pemberontak dibagian barat tsb.

Tentara sewaan asing dikirim ke
Yaman

Dalam pada itu Hassan Al Avri, pada ketua Dewan Republik merangkap panglima AB Republik tsb dlm konferensi pers jang diadakandi Kairo dengan para wartawan asing menjatakan, bahwa negara2 imperialis mengirimkan sedjumlah besar tentara sewaan asing ke Yaman utk menjebarkan benih perpetjahan dan me timbulkan kekacauan2 dinegerinja.
Peristiwa.....



LUAR NEGERI :

15 -12-67

Pernyataan itu diperkuat oleh Avri dengan memperlihatkan beberapa petunjuk senjata buatan Amerika jg disita oleh tentara Yaman dari tangan tentara sewaan asing tsb. Diterangkan senjata2 itu langsung dikirim dari AS ke berbagai negara untuk dipergunakan oleh tentara sewaan asing itu dalam kegiatan2nja mengganggu keamanan dan perdamaian di beberapa negara tertentu. (R027/PAB/XII/67/H)

----(w)---

SUDAN MEMBENTUK PARTAI POLITIK BARU

Djakarta, 25 Des.(PAB)

Menurut pengumuman resmi jg dikeluarkan di Khartoum hari Rabu Partai Persatuan Nasional dan Partai Rakjat Demokratik di Sudan kini telah menggabungkan diri utk membentuk partai persatuan Demokratik jang baru.

Menurut pengumuman tsb Ismail al Azhari, pemimpin bekas partai Persatuan Nasional di angkat mendjadi ketua Partai baru tsb, sedangkan Sheik Ali Abdulrachman, ketua bekas Partai Rakjat Demokratik dipilih mendjadi wakil ketua Partai baru itu.

Dalam pengumuman itu dikatakan selandjutnja, bahwa tudjuan Partai baru ini ialah untuk melaksanakan nasionalisasi diseluruh Sudan dan bahwa sektor pemerintahlah jang dikemudikan hari akan memegang peranan-peranan penting jang menentukan.

Dibidang luar negeri, Partai tsb bertekad mendjalankan politik netral jang positif dan non blok, menentang imperialisme, kolonialisme dan pembedaan ras serta mendukung perdjoangan2 pembebasan diseluruh dunia.

Selandjutnja Partai tsb menjetudju dan menghenjaki di achirinja perlombaan persendjataan nuklir serta dikeluarkannja larangan terhadap dilakukannja pertjobaan pertjobaan djenis senjata ini.

Achirinja Partai tsb menjerukan kepada segenap negara2 Arab untuk menggalang persatuan dalam perdjoangan bersama menentang pengaruh2 politik dan ekonomi negara2 imperialis di Arab serta menghapuskan pangkalan pangkalan militer negara2 asing diwilajah Arab.

(R.027/H/PAB/XII/67).

PERTEMUAN MEMPROTES KEDATANGAN KORPS
PERDANAAN AS DI SRI LANGKA

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Suatu pertemuan untuk memprotes adanya "Korps Perdamaian AS" di Sri Lanka telah diadakan di Colombo hari Rabu, jang menuntut agar anggauta2 Korps tsb dengan segera meninggalkan kembali Sri Lanka.

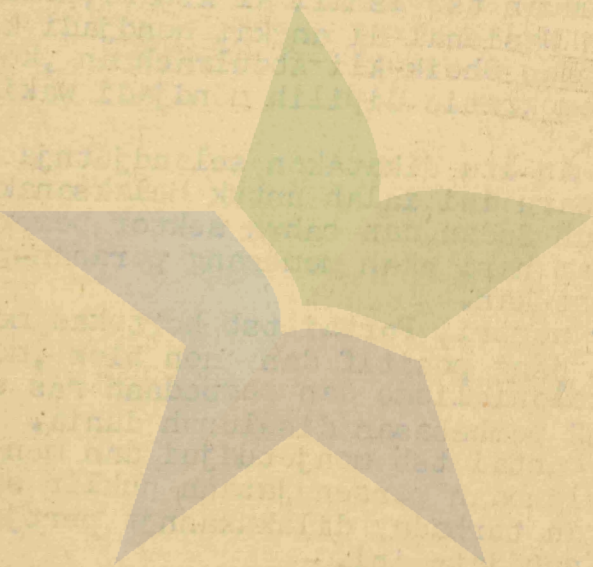
Para.....

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

SECRET

15 Dec 1944

Main body of faint, illegible text, appearing to be a memorandum or report.



Faint text at the bottom of the main body, possibly a signature or date.

SECRET

15 Dec 1944

Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.

LUAR NEGERI :

15 - 12 - '67

Para pembijtara dalam pertemuan itu menuduh, bahwa Korps tsb mempunyai hubungan dengan CIA dan menjalankan kegiatan2 jang berupa turut tjampur tangan dalam masalah2 dalam negeri negara2 dimana mereka berada.

Pertemuan tsb diadakan berkenaan dengan datangnya 60 orang sukarelawan Korps perdamaian di Sri Lanka. Untuk melindungi mereka dari kemungkinan2 dilantjarkannya demonstran2 demonstrasi2 anti AS, maka para pembesar setempat mendjemput anggota2 Korps Perdamaian tsb dari lapangan terbang dengan pengawasan polisi jang kuat.

(R.027/H/PAB/XII/67).

GUGATAN PETANI2 DJEPANG TERHADAP TANAH JANG
DIPAKAI UNTUK PANGKALAN MILITER AS DI -
T O L A K

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Pengadilan distrik Tokio hari Rabu telah menolak gugatan jang diajukan oleh sekelompok petani dari daerah2 pinggiran Tachikawa, terhadap tanah2 jang telah diambil oleh pemerintah Djepang 12 tahun jl. untuk perluasan pangkalan udara AS diwilayah tsb.

Jang digugat itu adalah tanah seluas 15.600 meter persegi jang oleh pemerintah Djepang diserahkan pada tahun 1955 kepada pihak militer AS untuk memperpanjang landasan take off bagi pesawat2 pembomnja.

Dalam gugatan tsb para petani mengemukakan, bahwa pengambilan tanah2 itu di anggap tidak sah karena dilaksanakan berdasarkan "Fakta Keamanan" Djepang - Amerika jang bertentangan dengan UUD. Menurut UUD Djepang peperangan dan persendjataan dinjatakan sebagai tabu, sedangkan Pakta Keamanan dengan Amerika tsb dengan djelas mengandung makna militer, demikian alasan para petani.

Pertimbangan pengadilan

Dalam menolak gugatan tsb pengadilan distrik Tokio mengemukakan sebagai pertimbangannya, bahwa Pakta itu tidak bertentangan dengan UUD Djepang, karena Pakta itu ditandatangani dengan tudjuan bukan untuk melantjarkan peperangan terhadap negara lain, melainkan djustru sebaliknya, yakni memperkuat pertahanan negara terhadap intervensi dari luar.

(R.027/H/PAB/XII/67).



KALKUTA LUNTJURKAN KATALEJA.

Djakarta, 15 Desember (FAB).

Sebuah kapal laut, MV "Theressa", jang dibuat seluruhnja di Kalkuta oleh Perusahaan Shalimar Ltd telah diluntjurkan minggu jang lalu.

Kapal itu dimaksudkan untuk melajani trajek2 di kepulauan Andaman dan Nicobar diteluk Benggala. Dibangun menurut perintjian Departemen pelajaraniaga India kapal itu meruoakan suatu kapal penumpang untuk jarak dekat (interinsuler), diperlengkapi bahan2 jang bisa bertahan selama 8 hari. Sebuah kapal lagi dengan nama MV "Katehall" sedang dalam penjelesaian.

(R049/Rel/FAB/XII/67).

---in---

TJINA KOMUNIS KASAK KUSUK DISEPANDJANG
PERBATASAN SIKKIM UTARA.

Djakarta, 15 Desember (FAB).

Warta India menjatakan bahwa Tjina Komunis sedang mengadakan konsentrasi pasukannja diseberang perbatasan Sikkim utara, memperkuat2 pusat2 gardu pertahanannja disemua perbatasan itu.

Setelah terdjadi saling tembak dengan pasukan India di Tjelah Nathu pada September dan operasi2 pertjobaannja di Tjelah Cho bulan Oktober (keduanja di Barat Laut Sikkim) Tjina nampaknja telah mengalihkan perhatiannja ke Sikkim utara.

Sikkim utara mendiorok kedalam daerah Tibet dan tingginja perbatasan antara 16000 sampai 19.000 kaki. Didaerah itu tidak berpenghuni. Disebrang daerah jang terpentjil itu terdapat desa2 Lanchen dan Lachung jang indah.

(R050/Rel/FAB/XII/67).

---in---

ORANG2 KHAMPA MELAWAN TJINA DI TIBET.

Djakarta, 15 Desember (FAB).

Beberapa ribu orang Khampa jang pada hari2 pertama Tjina menduduki Tibet menggunakan taktik mengusir dan menakuti orang2 Tjina, sekarang kembali aktif, menjerang pos2 pasukan Tjina dipedalaman Tibet.

Bisht Rabgis, seorang Lama jang baru2 ini melarikan diri dari Lhasa ke India mengutakan di Jammu bahwa dalam sebulan sadja lebih dari 100 orang Khampa menjerang konvoi2 militer Tjina, dan membunuh sedjumlah Tjina di timur Tibet.

Rabgis.....



LUAR NEGERI :

15-12-67.

Rabgis mengatakan tentang kekedjaman2 dan perlakuan2 kasar terhadap para pengungsi Tibet, bahwa dalam sebulan sadja beberapa ratus wanita dibawa pergi dan beberapa diantaranya dibawake Tjina. Pengawal merah tibet telah merampok benda2 kepunjaan kelen- teng Budha.

Menurut Rabgis kira2 2000 orang Khampa dan Amdos tengah mengadukan perang gerilja terhadap Tjina di daratan tinggi Jyangman di Tibet Utara. Para geril jawan itu bersendjatakan senapan2 mesin dan sendjata2 otomatis dan mortir2.

Dia mengatakan bahwa pembunuhan2 terhadap orang2 Muslim di Sinkiang makin ditingkatkan oleh Tjina Komunis.

(R050/Re1/PAB/XII/67).

---in---

DEWAN KOTA TOKYO TUNTUT PENGEM
BALIAN OKINAWA DARI AS.

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Sidang paripurna Dewan Kota Tokio hari Ra bu telah mengeluarkan resolusi jang menuntut agar Okinawa dengan segera dan tanpa bersjarat diserahkan kembali oleh AS kepada Djepang.

Dikatakan bahwa penjerahan kembali Okinawa ini merupakan hak jang sah bukan sadja bagi rakyat Okinawa jang berdjuta-djuta baniaknja itu, melainkan djuga bagi segenap rakyat Djepang.

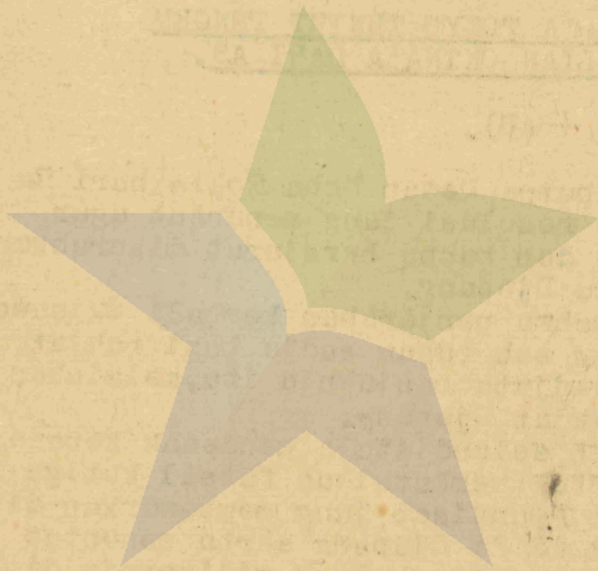
Resolusi tsb selandjutnja mendesak kepada pemerintah Djepang untuk membatalkan fatesal ketiga dari perdjandjian San Fransisco jang membenarkan di tempatkannja pasukan2 AS di Djepang serta menuntut pula, agar AS menghapuskan pergkalan2 militernja di kepulauan tsb.

Resolusi ini jang untuk pertama kalinya dalam sedjarah Dewan Kota Tokio tsb diadjukan oleh golongan kiri jang terdiri dari Partai2 Sosialis, Komunis dan Komeio.

Dalam hubungannya ini dapat diwartakan, bahwa kepulauan Okinawa jang digugat itu sedjak 20 tahun j.l. dikuasai oleh AS.

(R027/H/PAB/XII/67).

-----iinin-----



LUAR NEGERI :

15 - 12 - '67

BENJAMIN SPOCK DIPERIKSA OLEH FBI

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Dalam siaran televisi Rabu malam di New York, spesialis kanak2 jang terkenal dan bedjoang perdamaian AS, Dr Benjamin Spock menerangkan, bahwa ia telah didatangi oleh petugas2 FBI diflatnja jang selama 1½ djam memeriksanya untuk mengetahui sebab2 ia menentang politik AS di Vietnam. Petugas2 FBI tsb menurut Spock menanyakan pula kepadanya, apakah ia menahami, bahwa dengan turut sertanja dalam demonstrasi anti perang di Vietnam, ia dapat dituntut dengan antjanaan hukuman pendjara selama 5 tahun.

Spock menerangkan selandjutnja, bahwa kundjung an petugas2 FBI jang tak di duga2 olehnja itu, diperintahkan oleh Djaksa Agung AS dengan tudjuan untukuk men tjegahnja turut serta lagi dalam kegiatan2 jang menentang politik luar negeri pemerintah AS.

Minggu jl dokter jang berusia 64 tahun itu telah ditangkap oleh para pembesar New York karena turut serta dalam demonstrasi2 anti perang di Vietnam dan di tuduh telah turut mengatjaukan ketertiban umum.

Dalam bulan D januari tahun depan, ia akan di hadapkan kemuka pengadilan untuk mempertanggung djawab kan perbuatannya.

(R.027/H/PAB/XII/67).

KELOMPOK DALAM PARTAI BURUH HENDAKI AGAR
INGGRIS GUNAKAN KEKERASAN TERHADAP
RHODESIA

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Suatu kelompok dalam Partai Buruh jang berkuasa di Inggris telah menjerukan kepada Mr Wilson, agar menggunakan kekerasan terhadap Rhodesia. Kelompok tsb dan anggauta2 lainnja dalam Partai itu djuga menjerukan, agar pemerintah Inggris djangan mpendorkan embargo terhadap pengiriman sednjata, sendjata2 ke Afrika Selatan.

Pernyataan2 terachir mengenai perasaan dilingkungan Buruh di umumkan oleh bekas seorang menteri Inggris setelah hari Rabu diadakan rapat oleh Partai tsb di London.

Sebelum itu, menteri urusan Luar Negeri George Thompson menerangkan di Majelis Rendah, bahwa kemungkinan akan terbajajalnja penyelesaian mengenai masalah Rhodesia tanjaknja terdjs berkenaan dengan timbulnja perselisihan2 paham baru jang besar antara Inggris dan Rhodesia.

(R.027/H/PAB/XII/67).



15 - 12 - 1967

LUAR NEGERI :

PROGRAM BANTUAN LUAR NEGERI AS DIPAPAS
DENGAN PENGURANGAN BIAYA SEBESAR 1 MILYARD
DOLLAR

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Program bantuan luar negeri presiden Johnson kabarnya sangat menderita kemundurannya karena jumlahnya dikurangi hampir dengan 1 milyar dollar oleh Kongres AS.

Panitia2 yang bersangkutan dalam kedua kamar Kongres hanya memperkenankan disediakan bantuan luar negeri sebesar 2.315.700 djuta dollar kepada 108 negara dalam tahun keuangan sekarang ini, jumlah mana hampir 1 milyar dollar kurang dari yang dimintakan oleh presiden Johnson. Program bantuan tsb kini akan dibahas dalam sidang gabungan kedua kamar Kongres. Menurut sumber2 yang mengetahui, apabila sidang gabungan Kongres menyetujui jumlah yang ditetapkan oleh Panitia2 tsb maka program bantuan luar negeri AS akan dibiayai dengan dana keuangan yang terendah sedjak tahun 1948.

(R.027/H/PAB/XII/67).

KTT 12 NEGARA AFRIKA TIMUR DAN TENGAH DIBUKA
DI KANTARA.

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Para pemimpin 12 negara2 Afrika yang membentangi dari Laut Merah sampai ke Zambesi hari Kamis bertemu di Kantara guna melaksanakan KTT negara2 Afrika Timur dan Tengah yang ketiga. Konferensi tsb yang dibuka akan berlangsung selama 3 sampai 4 hari akan meliputi pembahasan tentang masalah2 keamanan, komunikasi dan perdagangan diwilayah itu.

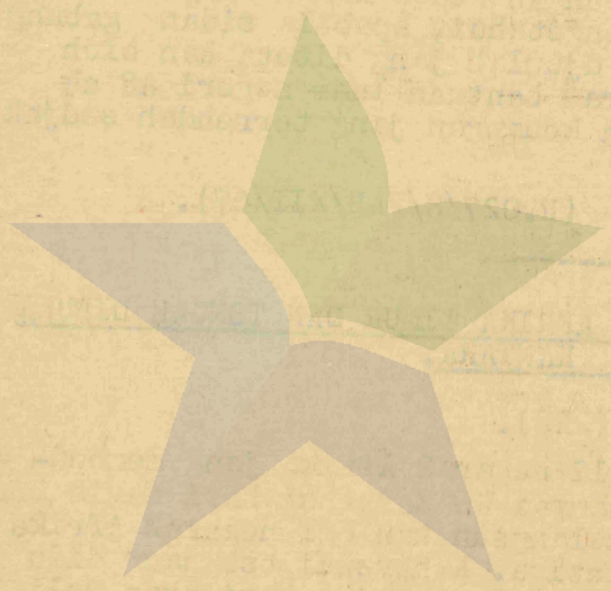
Hal2 yang lainnja yang akan dibahas dalam konferensi tsb ialah masa depan 123 seribu seribu kulit putih Kongo yang kini ditawan di Rwanda. KTT tsb menjusul diadakannya pertemuan2 terdahulu yakni, di Nairobi tahun jl. dan di Kinshasa dalam bulan Pebruari tahun ini.

Negara2 yang ikut serta ialah Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi, Kongo-Kinshasa, Kongo-Brazaville, e Sudan, Uganda, Zambia, Somalia, dan Ethiopia.

(R.027/H/PAB/XII/67)

1875
REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE
LAND OFFICE

Presented to the Senate
at the session of 1875-76
by the Hon. J. M. [Name]
Commissioner of the Land Office



PRINTED BY
THE STATE PRINTING OFFICE
AT ALBANY, N. Y.

ALBANY, N. Y.
[Faint text continues, including names and dates]

INBAR NEGERT :

15-12-67.

DEMONSTRASI MEMPROTES PERHIMPUNAN DIKALAH-
NGAN BURUH INDUSTRI DI BENGALORE.

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Menurut berita2 pers di New Delhi, lebih dari 5.000 buruh perusahaan2 industri di Bengalore hari Rabu melantjarkan demonstrasi untuk memprotes pemertjatan2 jang dilakukan pihak pengusaha terhadap buruh2nja.

Untuk membubarkan demonstrasi ini, satuan2 polisi terpaksa menggunakan gas air mata dan kabarnya 53 orang diantaranya ditangkap.

(R027/H/PAB/XII/67).

---in---

KONFERENSI PARA AHLI AFRIKA DI ^ADKAR.

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Para ahli Afrika dari 54 negara sedjak Rabu pagi j.l. telah berkumpul di Dakar, ibukota Senegal untuk menghadiri konferensi jang diadakan di aula Universitas kota tsb.

Dalam konferensi tsb para ahli membahas pelbagai masalah penting dalam kehidupan dan sedjarah benua Afrika jang meliputi bidang2 kesenian, bahasa dan sosiologi pelbagai suku bangsa di benua tsb.

Presiden Senegal Leopold Sedar jang membuka konferensi itu dalam pidato sambutannya menegaskan akan pentingnya konferensi tsb jang dipancarkan sebagai suatu manifestasi tentang kerdjasama internasional dalam mempeladjar masalah2 jang berkaitan dengan Benua Afrika.

(R027/I/PAB/XII/67).

---in---

UNI SOVJET DAN RSD AKAN TERTIB
BANTU VIETNAM.

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Uni Sovjet dan Djerman Timur bertekad untuk terus membantu Vietnam Utara. Tekad tersebut dikeluarkan di Moskow pada akhir perundingan tingkat tinggi selama dua hari antara Pemerintah Uni Sovjet dan Pemerintah Djerman Timur.

Mereka djuga mendukung perjuangan Vietcong sebagai satu2nja wakil dari rakyat Vietnam Selatan.

(R046/AC25/PAB/XII/67).

---in---



LUAR NEGERI :

5 - 12 - 1967

DOKUMEN DAN MEMORANDUM FRONT PEMERBEKASAN
VIETSEL AKAN DI U M U M K A N

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Ketua Panitia Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat William Fullbright mengatakan, industri pertahanan dan buruhja di Amerika telah merupakan suatu pemusatan sistim sosialis setjara besar2an dalam suatu perekonomian jang sebenarnya bersifat bebas.

Fullbright jang terkenal sebagai penentang perang Vietnam itu mengatakan di Parlemen bahwa perang Vietnam telah didukung pula oleh kalangan industri militer jang merupakan kekuatan politik jang penting di Amerika Serikat.

Sementara itu VOA mengatakan bahwa hari Kamis akan diumumkan dokumen atau memorandum dari Front Nasional Pembebas Vietnam Selatan kira2 sebanjak 27 halaman. Memorandum itu telah diserahkan oleh deputy menteri luar negeri Rumania kepada sektdjen PBB U Thant.

Sementara itu rombongan pertama dari kesatuan tentara pajung Amerika jang berdjumlah 10 ribu orang hari Rabu mulai tiba di pangkalan Binh Hoa. Penambahan pasukan2 Amerika itu akan meningkatkan djumlah pasukan pasukan Amerika di Vietnam mendjadi 475 ribu orang.

(R.046/A.025/PAB/XII/67).

PARLEMEN INDIA SETUDJU, BAHASA INGGRIS
SEBAGAI BAHASA RESMI I N D I A

Djakarta, 15 Desember (PAB).

VOA mengatakan bahwa madjelis rendah dari Parlemen India hari Rabu menjetudju rentjana undang2 jang mempertahankan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa resmi di India. Rentjana undang2 itu telah menimbulkan pertentangan pendapat. Demonstrasi2 menentang rentjana2 Undang2 itu berkobar di India bagian Utara dan Tengah.

Berita lain mengatakan bahwa djumlah korban akibat gempa bumi di India telah meningkat mendjadi 172 orang, sementara puluhan desa dan daerah2 bukit di India barat masih belum memberikan laporan lengkap mengenai djumlah korban.

(R.046/A025/PAB/XII/67).



LUAR NEGERI :

15 - 12 - '67

RADJA YUNANI KONSTANTIN LARI KEDESA-DESA

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Berita2 dari Junani jang masih simpang siur mengatakan bahwa radja Junani Konstantin telah lari dari desa kedesa setelah usaha untuk menggulingkan pemerintah Junani jang didukung oleh golongan mili ter gagal. Baik siaran radio Larissa jang berada di bawah radja Konstantin, maupun radio Athena dibawah pemerintah Junani jang sekarang, saling mengatakan bahwa mereka berhasil menggulingkan usaha musuh.

Radio Larissa mengatakan bahwa suatu pemerintahan telah dibentuk, terletak kurang lebih 90 km dari Athena, sedangkan Angkatan Darat, Angkatan Udara dan seluruh Angkatan Laut berpihak kepada Radjak.

Dalam pada itu radio Athena mengatakan bahwa Radja Konstantin telah disingkirkan dan kini diang kat putra Mahkota menggantikan Radja. Menurut radio tsb selanjutnja, kabinet baru telah dibentuk dibawah pimpinan Kolonel George Papadopoulos dan mereka di lantik oleh Uskup Agung. Demikian berita2 jang dikum pulkan dari VOA dan Radio Australia.

(R.046/A025/PAB/XII/67).

PANITIA KETJIL A.B. PEMERINTAH AS
SERUKAN SUPAJA DILAKUKAN OFFENSIF
LEBIH LUAS THD VIETARA

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Panitia Ketjil Angkatan Bersendjata Pemerintah AS hari Kamis menjerukan, agar AS melakukan tindakan offensif jang lebih luas terhadap Vietara.

Tindakan jang diserukan itu meliputi penutupan pelabuhan Komunis Haiphong serta tindakan2 perondaan dibeberapa bagian Kamboja jang dinjatakan mendjadi di tempat2 persembunjan pasukan2 Vietara dan Vietcong.

Seruan ini diadjukan berkenaan dengan tersiar nja berita2, bahwa pihak Vietcong kini telah mulai men tjari pendekatan dengan mengadakan memorandum setebal 27 halaman kepada Sekdjen PBB U Thant untuk disiarkan/ dibagi-bagikan sebagai dokumen kepada negara2 anggota, dalam mana Front Pembebasan Vietsel kabarnja mengusul kan dibentuknja pemerintahan koalisi antara Vietcong - Vietsel sebagai salah suatu tjara guna menjelesa kan masalah Vietnam.

Dalam.....



LUAR NEGERI :

15 - 12 - 67

Dalam pada itu diwartakan dari Washington, bahwa pemerintah AS kini sedang mempertimbangkan dikeluarkannya seruan agar Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang untuk membahas masalah Vietnam, sedang para utusan PBB berpendapat, bahwa dokumen itu akan mendorong permintaan untuk diadakan pembahasan mengenai perang Vietnam, baik oleh Dewan Keamanan, maupun Majelis Umum PBB.

(R27/H/PAB/XII/67)

---oSo---

MISI PERDAGANGAN DENIS SINGH KE
AUSTRALIA, SELANDIA BARU DAN DJEPANG
PANG BERHASIL

Djakarta, 15 Desember (PAB).

Menteri perdagangan India, Denish Singh mengatakan, bahwa misi yang dipimpinnya ke Australia, Selandia Baru dan Djepang atas nama negara2 yang sedang berkembang merasasngat puas atas hasil2 perundingan yang kini sedang dilakukan. Misi tsb bertugas untuk meratakan djalan bagi sidang2 keduakonperensi perdagangan an perkembangan PBB yang akan diadakan di New Delhi bulan Pebruari tahun depan.

Menteri perdagangan India tsb dalam pembitjaraan2nya itu menjerukan agar barang2 djadi dan setengah djadidari negara2 yang sedang berkembang dapat lebih banyak masuk kepasarannya negara2 yang sudah maju.

Denish Singh yang dewasa ini berada di Tokio, menerangkan hari Kamis, bahwa pemerintah Djepang menukut pendapatnya berkeinginan untuk memberikan pertimbangan sebaik2nya terhadap masalah2 yang disampaikan kepadanya.

Diterangkan selanjutnya, bahwa missinya telah mengadakan pula pembitjaraan2 yang ramah tamah dengan pemerintah2 Australia dan Selandia Baru, dimana kedua negara tsb menundjukkan kesadaran tentang masalah2 yang dihadapi oleh negara2 berkembang dan mendjandjikan akan berusaha untuk menemukan suatu penyelesaian. Dinjatakan, bahwa missinya telah mentjapai hasil2 yang memuaskan sekali.-

(R27/H/PAB/XII/67).

---oSo---



IU
Dja
ol
la
at
tur
tar
dgi
per
sal
ber
ti
ti
di

Dja
lur
ort
ort
sir
ker
bur
asi
sia

Dkt
bhw
mer
an
di
lua
nga
an
Jur

Jur
reka
law
jg
sek
an
per
lih
jg

utk
pir
AD
Per
nel
pre
ge
men

VIETARA TIDAK MAU DAMAI?

Djakarta, 15 Des.(PAB)

Vietara dilukiskan sbg sebuah kamp tawanan jg besar oleh 7 orang Spanyol jg melangsungkan kehidupan dlm tawanan selama 15 sampai 20 th dan baru sadja kembali di Spanyol. Ke-7 anggota tsb adlah anggota2 Legiun Asing Perantjis jg pernah turut serta dlm peperangan di Indo China dan salah seorang dian taranja mengatakan, mereka telah dibudjuk utk menihak ke Vietara dgn djandji2 akand dipulangkan kembali kenegaranja. Akan tetapi mereka bakhandimasukan dlm kamp tawanan sampai mereka menderit a sakit. Menurut keterangan ke 7 orang Spanyol tsb Vietratidak bermaksud utk menghentikan peperangan dan bhw presiden Ho Chi Min tidak mau menerima perdamaian jg diperundingkan dan bhw Hanoi tidak mengkui hak rakjat Vietsel utk menentukan nasibnja sen diri.

(RO27/PAB/XII/67/H)

NASA ACHRI PERLUNTJURAN2NJA TAHUN INI DENGAN
TEMPATKAN 2 SATELIT KEDLM ORBIT JG BE LAINAN.

Djakarta, 15 Des.(PAB)

Djawatan Ruang angkasa AS (NASA) mengachiri rentjana pe luntjurannja th ini dgn menempatkan 2 buah satelit dlm garis orbit jg berlainan. Sebuah diantaranya tlh diluntjurkan dlm garis orbit matahari utk mengumpulkan keterangan2 ttg angin matahari sinar2 kosmis, debu2 tehnik dan magnit. Satelit lainnja jg dinana kan sbg satelit pertjobaan/tlh diluntjurkan kedalan garis orbit bumi utk memenuhi stasiun2 dlm djaringan penamat penerbangan astronout ber manusia dlm rangka persiapan penerbangan bagi manu sia2 dimasa depan./danlatihan.

(PAB/XII/RO27/67/H/7)

RAJA KONSTATINE TIBA DI ROMA BESERTA KELUARGA

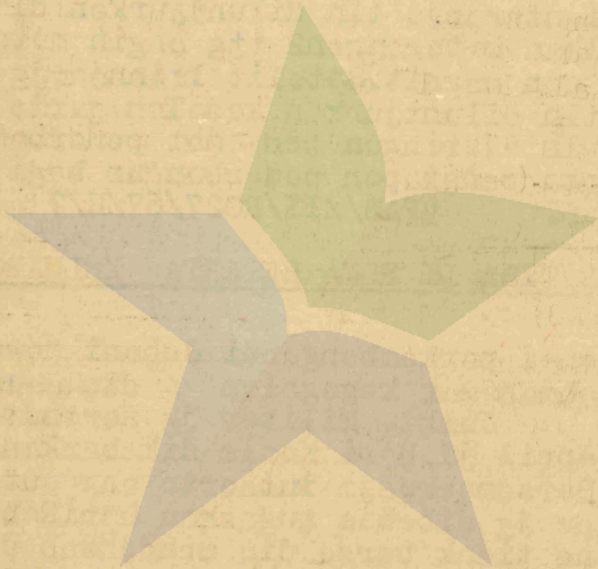
Dkt. 15 Des.(PAB)

Berita2 terachir menenai perkembangan di Junani newartakan bhw radja Konstatine jg telah menemui kegagalan dlm usaha utk menggulingkan pemerintah Junka Militer jg merebut kekuasaan an dinegara tsb sedjak bln April jl, hari Kanis dikabarkan tiba di Roma dgn pesawat terbang. Berserta radja kutserta anggota2ke luarganja dan bekas PM Kolias jg dibebas tugaskan hari Rabu. Dilapa nganja dan bekas PM Konstatine tidak berse dia mendjawab pertanja an jg diadakan oleh para wartawan mengenai perkembangan2 di Junani.

Sementara itu dari Athena diwartakan, bhw pemerintah Junka militer mendjandjikan amnesti atau pengampunan bagi me reka jg tersesat oleh budjukan2 utk memalingkan AB supaja me lawan pemerintah. Menurut djubir pemerintah, semua djendral jg terlibat dlm usaha coup d'etat itu telah menjerah dan sama sekali tidak terdjadi pertumpahan darah dlm perebutan kekuasaan ini. Ditegaskan nja pula bahwa sama sekali tidak terdjadi pertempuran2, sedang komunikasi seluruh Junani telah pu lih kennali; ketjual dipulau Kreta, dimana menurut laporan2 jg diterima, armada AL Junani bergerak untuk membantu radja.

Berita2 lain newartakan, bhw harapan radja Konstatine utk menimpin contra coup d'etat bersama rakjat pada putjuk pinan pasukan2 pro Radja lenjap dgn ditangkapnja para komandan AD jg setia kepadanya oleh MB. Staf Angkatan Bersendjata. Penimpin Junka militer jg baru Kol. Papadakilos mengumumkan melalui radio Athena hari Kanis, bhw radja Konstatine tlh di preteli kekuasaannja dan telah digantikan oleh Letdjen Geor ge Surjakis sbg pen tusa. Diterangkannja, bhw ia kini telah menegang semua kekuasaan eksekutip.

(RO27/PAB/XII/H/67).



OLEH RAGA :

15 -12 -67

KIWAL KOANDA KAL GONDOL KEDJUARAAN SPIDMARSCH
HUT INFANTERI

Bandjarmasin, 15 Des.(PAB)

Menjongsong dan memeriahkan HUT INFANTERI 15 Des. 67 telah berlangsung perlombaan Spidmarsch (gerak djalan) jg diselenggarakan oleh Denma Koanda Kal dandiikuti oleh seluruh Neveau Koanda Kal. Keluar sebagai juara dalam perlombaan spidmarsch ini adalah Kiwal Koanda Kal jg berhasil mengumpulkan 66005 dan runner up dipegang oleh POM Koanda Kal nilai 64425,5. Pertandingan berlangsung kemarin hari Senin tgl. 11 Des. 1967.

Perlu ditambahkan bhw pertandingan 2 lain jg diselenggarakan oleh Denma Koanda Kal yaitu pertandingan dlm tjabang2 olah raga militer beregu Croscoun try djarak 5 Km, spidmarsch dan menembak dlm djenis2 pistol L.E./Garand djarak 25 m dan 100 pedang utk olahraga umum terdiri dari satu tjabang olahraga sadja jaitu Volley Ball. Keseluruhan pertandingan2 ini hanya terbatas dandiikuti peserta2 dari Skoanda Kal, Kiwal Koanda Kal, Dinas2 Djawatan Tingkat Koanda Kal.

(RO8/Rel/PAB/XII/67)

------(w)-----

POM KOANDA KAL REBUT KEDJUARAAN VOLLEY
HARI INFANTERI

Bandjarmasin, 15 Des.(PAB)

Dalam rangka memeriahkan HUT Infanteri 15 Des. 67 telah berlangsung pertandingan Volley dilapangan Volley Ball Ma Koanda Kal yang diikuti dan diselenggarakan oleh Neveau Koanda Kal. Pertandingan tsb telah berlangsung sedjak hari Sabtu tgl. 9 Des. 67 mentjapai babak Penjisihan dan langsung kebabak Seni final, sedang final pertandingan dengan Volley tsb dilangsungkan pada hari Senin tgl 11 Des. 67.

Dengan sistim pertandingan "The best Three" telah keluar sebagai djuara I POM KOANDA KAL setelah berhasil menjisihkan dan memukul lawan2 rja dari babak penjisihan hingga ke babak final. Urutan kedjuaraan volley dlm rangka HUT Infanteri tsb adalah sb

Djuara I : POM KOANDA KAL (Nilai 6)

Djuara II: STAF KOANDA KAL (Nilai 5)

Djuara III: HUB KOANDA KAL (Nilai 4)

Pertandingan volley ball ini telah diikuti oleh Adj. Koanda Kal, HUB KOANDA KAL, STAF KOANDA KAL, ITRETI KOANDA KAL, POM KOANDA KAL dan GIN KOANDA KAL.

Demikian Penanda Halimantan

(BO9/Rel/PAB/XII/67)

------(w)-----



OLAH RAGA :

15-12 -67

HUT BRAWIDJAYA DAN BRASILI

Surabaja, 15 Des.(PAB)

Mendjelang HUT Brawidjaya yang ke 22 tgl.
17 Des. 1967 di Stadion Tambaksari Surabaja akan di
pertandingkan Sepak bola tradisional, Brasildi (Bra
widjaya, Iliwangi dan Diponegoro).
Atjara pertandingan : 13 Des. 1967 Brawidjaya - Diponegoro.
14 Des. 1967 Diponegoro - Siliwangi.
15 Des. 1967 Siliwangi Brawidjaya.
16 Des. 1967 Brasildi - Persebaja.
17 Des. 1967 Persebaja - Persema (Malang).

(RO20/P/PAB/XII/67).

----(w)----

PERTANDINGAN OLAHRAGA DAN HUT PASKOARMA

Surabaja, 15 Des. (PAB)

Dalam rangka memperingati HUT ke V Paskoarma
I tgl. 17 +1- 1968 telah dibuka dengan resmi, olahraga
militer dan olahraga umum, di Lapangan Appel KKO Wono
kitri dan sebagai Irup adalah Ka Staf Paskoarma ILtk
KKO J. Suju.

Djuga akandiadakan pertandingan dengan Brigif
2 Kodam VIII Brawidjaya - Operasi 2 Bhakti berupa pengo
batan keliling sepak bola, Volley Ball handball dll.

(RO20/P/PAB/XII/67).

----(w)----

S E L E S A I